



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**ARTIKEL
KECERDASAN BUATAN DALAM SENI
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.
Yogyakarta, 29 Maret 2019**

--

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Alhamdulillah, segala puja puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan tetesan pengetahuan dan sedikit penguasaan atas teknologi informasi kita semua.

Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta telah masuk dalam Dies ke-35 atau Lustrum VII. Usia 35 tahun ini sebenarnya mempunyai usia komponen kelembagaan yang lebih tua. Komponen lembaga pendidikan tinggi, yang pertama adalah Akademi Seni Rupa (ASRI) yang berkembang menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia (STRI 'ASRI') berdiri tahun 1950.

Berikutnya adalah Akademi Musik Indonesia (AMI) yang berdiri tahun 1963, dan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) yang berdiri tahun 1963. Ketiga pendidikan tinggi seni itu bergabung menjadi ISI Yogyakarta tahun 1984. Jadi jika dihitung dari komponen pembentuk yang pertama yaitu STRI 'ASRI', pengalaman pengelolaan lembaga pendidikan tinggi ISI Yogyakarta sudah berusia 69 tahun. Pengalaman tersebut telah memberikan banyak kepeloporan, karya-karya yang monumental,

dan kekuatan potensi alumni-alumninya berperan dalam dunia seni di ranah nasional dan internasional. Di usia yang telah matang tersebut, maka ISI Yogyakarta perlu melakukan refleksi atas berbagai pencapaian baik kelebihan maupun kekurangan, khususnya selama 5 tahun terakhir.

Lustrum VII–ISI Yogyakarta mengusung tema “Kecerdasan Buatan dalam Seni di Era Revolusi Industri 4.0. (*The Artificial Intelligence in Arts for Industrial Revolution 4.0.*)”. Tema tersebut kiranya perlu diselaraskan dengan visi dan misi ISI Yogyakarta sebagai pelopor perguruan tinggi seni nasional yang unggul, kreatif, dan inovatif berdasarkan Pancasila.

Meskipun seni mengutamakan olah rasa, penggunaan teknologi tidak bisa dinafikkan. **Perkembangan** dunia teknologi informasi dan komunikasi semakin masif menguasai bumi. Kebutuhan akan teknologi masuk ke segala aspek peradaban manusia, termasuk aktivitas senirupa. Hal itu mengharuskan para seniman berfikir untuk meng-elaborasi teknologi dalam karya seninya. Semua hal yang berkaitan dengan proses kesenian diupayakan terkoneksi secara digital. Untuk itulah peluang dan tantangan untuk mengadopsi teknologi dalam karya seni kiranya patut menjadi pertimbangan.

Sinergi atau dialektika dengan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk saling mengisi. Mengingat memasuki era Revolusi Industri 4.0, kemampuan beradaptasi dan bertransformasi menjadi faktor penting yang harus dimiliki para seniman. Revolusi industri menempatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai inti dari setiap aspek proses kreatif yang dilakoni seniman. Jika tidak dilakukan, bisa saja terlindas oleh derasnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Transformasi digital dalam karya seni tersebut bisa dimulai dengan kerja kreatif yang dilakukan secara kolektif-kolaboratif. Memadu padankan ragam keilmuan untuk merancang sebuah proyek kesenian. Dalam arti, berfokus pada proses elaborasi antar disiplin ilmu, tujuannya untuk menemukan dimensi baru dalam konseptualisasi seni dan inovasi teknologi, berusaha untuk menyatukan unsur seni, sains, teknologi, desain dan dunia alam. Dengan kata lain, memberikan gambaran, bahwa teknologi digital telah memungkinkan kita untuk lebih bebas dalam berkarya.

Hal itulah yang perlu dipikirkan, bagaimana melihat peluang perkembangan teknologi yang akan semakin pesat di masa depan, yang mengharuskan berfikir bagaimana seni dan teknologi berada dalam dimensi digital. Karya seni bisa berinteraksi dengan manusia, hingga membentuk aset budaya baru dalam dunia kesenian masa kini. Bergerak dalam kreativitas seni dan teknologi suatu wacana kesenian yang berada dalam lingkup *New Media Art dan* memberikan daya tarik tersendiri pada masyarakat.

Media baru seperti gadget, aplikasi, games, animasi, kinetik dan sejenisnya, menjadi konsep karya yang menantang di era revolusi saat ini. Memanfaatkan kerja teknologi termutakhir demi sebuah peradaban (seni). Kerja-kerja seni tidak lagi dikerjakan sebatas ekspresi individu semata. Keterlibatan lintas keilmuan dibutuhkan untuk menciptakan karya yang menggugah. Terlebih melibatkan publik seni untuk saling berinteraksi dengan karya seni.

Saya kira ISI Yogyakarta siap menghadapi era Revolusi Industri 4.0, karena kreativitas sebagai basis Revolusi Industri 4.0 telah dimiliki mahasiswa maupun almamaternya yang akan selalu menekankan dialektika antara rasio, rasa, dan intuisi., harapannya agar tidak kalah bersaing, agar mampu menjawab tantangan berbagai zaman, dengan ekosistem seni yang saling mengisi yang lulusannya lebih diarahkan untuk mampu menciptakan dibandingkan mencari pekerjaan.

Intinya, perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang identik dengan otomatisasi, tidak akan mampu membunuh kreativitas dan daya seni yang memang tidak bisa diotomatisasi. Tetapi sebaliknya, sangat dibutuhkan mengingat Revolusi Industri 4.0 berkaitan pada semua lini pekerjaan termasuk kesenian, seperti desain, kreativitas, dan sebagainya.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat Lustrum VII–ISI Yogyakarta. Sekali lagi saya berharap, lulusan ISI Yogyakarta hendaknya memiliki literasi baru, tidak hanya terkait dengan bidang studinya, sehingga berbekal *general education*, yaitu pelajaran-pelajaran dasar untuk meneropong landasan ke masa depan, mahasiswa ISI Yogyakarta harus siap dan mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0, dengan berbagai inovasi yang semakin cepat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Keynote Speech
BEDAH BUKU
”MENGAPA KITA HARUS KEMBALI KE UUD 1945”
Balai Senat UGM, 13 Maret 2019

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati; Para Narsumber;**
- **Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Alhamdulillah puja puji syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada kegiatan Bedah Buku bertema **“Mengapa kita harus kembali ke UUD 1945”**, yang diprakarsai oleh Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam keadaan sehat wal afiat.

Hadirin yang berbahagia,

Dari tahun 1999 hingga 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara bertahap, dalam waktu relatif singkat selama 4 tahun, perubahan tersebut mengalir begitu saja sebagai respon terhadap tuntutan reformasi.

Perubahan yang dilakukan dalam sidang MPR sangat banyak dan mendasar, sehingga Undang-Undang Dasar aslinya tidak dikenali lagi, hanya namanya saja yang dipertahankan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan isinya sudah berubah secara

besar-besaran karena secara prinsipil sudah berubah sama sekali. Artinya, melalui 4 kali amandemen tersebut MPR sesungguhnya telah membentuk Undang-Undang Dasar baru dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, berdasarkan hukum, dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antar organ negara disertai prinsip *check and balances*, perluasan jaminan hak asasi manusia dan desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom.

Perubahan UUD 1945 telah berhasil mengubah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik menjadi kekuasaan yang demokratis berdasarkan atas hukum dan desentralistik. Penyelenggaraan negara yang berpusat pada negara bergeser berbasis kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat mendapatkan kembali kedaulatannya yang sempat digenggam oleh Presiden sebagai Mandataris MPR selama lebih dari tiga dekade.

Hubungan antar lembaga negara juga mengalami perubahan, karena lembaga negara diposisikan setara dengan prinsip *check and balances*. Hubungan pusat dan daerah juga lebih proporsional dengan diberikannya kewenangan bagi pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan kata lain perubahan UUD 1945 bukannya tanpa alasan. Tetapi dengan perubahan tersebut, juga terdapat sejumlah kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan, seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas.

Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Akibatnya setelah lebih dari 10 tahun perubahan Undang-Undang Dasar, praktek penyelenggaraan negara kita masih jauh dari harapan, karena kegamangan aturan dasar dalam bernegara maupun karena budaya birokrasi kita belum banyak berubah.

Permasalahannya sekarang ialah setelah lebih dari 10 tahun perubahan UUD 1945 dilakukan, apakah kedaulatan betul-betul ditangan rakyat atau dengan kata lain demokrasi politik dan demokrasi ekonomi telah mampu mengantarkan rakyat menjadi lebih sejahtera? Apakah pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum, mengabdikan untuk kepentingan rakyat dan menjalankan pemerintahan secara adil, bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme? Apakah hukum telah ditegakkan secara adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu? Singkatnya setelah 10 tahun

lebih perubahan UUD 1945 apakah kultur penyelenggara negara telah mengalami reformasi atau belum?

Perbaikan memang ada, hanya belum menyentuh aspek yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara seperti yang dituntut oleh gerakan reformasi. Kata reformasi kehilangan kekuatannya untuk merombak kultur penyelenggara negara apalagi kultur masyarakat agar menjadi masyarakat yang berpikir, berkata, dan bertindak secara benar dalam menegakkan demokrasi di bidang politik dan ekonomi, menegakkan hukum, dan hak asasi manusia serta dalam membangun kepribadian dan jati diri bangsa yang Bhineka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUDN RI Tahun 1945.

Hadirin sekalian,

Kita ketahui bersama, Undang-Undang Dasar 1945 oleh para pendahulu kita disusun dengan sangat seksama dan tidak tergesa-gesa, adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan terdiri atas 4 Alinea, yang di dalam Alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut pendapat Bryce, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD, terdapat beberapa macam, sebagai berikut :

1. adanya kehendak para warganegara yang bersangkutan agar tejamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut;
2. adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau system tertentu atas pemerintah negaranya;
3. adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya;
4. adanya kehendak dari beberapa negara semula masing-masing berdiri sendiri, untuk menjalin kerjasama.

Berdasarkan pendapat Bryce tersebut, motivasi adanya UUD Negara Republik Indonesia, yang sekarang lebih dikenal UUD 1945 adalah adanya kehendak para Pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini ditujukan agar terjamin penyelenggaraan Ketatanegaraan NKRI secara pasti (adanya kepastiaan hukum), sehingga stabilitas nasional dapat terwujud.

Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa system politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu system politik menurut UUD 1945. Maka jika ada penafsiran bahwa UUD 1945 bisa disusun dalam waktu singkat, hal itu perlu dluruskan. Tetapi sejak UUD 1945 dinyatakan berlaku, banyak sekali protes yang muncul atas pelaksanaannya. Banyak masalah kebangsaan yang tidak teratasi, pluralisme agak terganggu, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin merajalela, sehingga muncul ide agar lembali ke UUD 1945.

Mungkin ide untuk kembali ke UUD 1945 itu mengandung niat baik dan nilai-nilai kebenaran, karena UUD tersebut dibuat langsung oleh para pendiri negara, sehingga mengandung nilai-nilai luhur, sekaligus untuk mengembalikan kewibawaan negara. Menjadi harapan kita bersama dengan perubahan UUD 1945 itu, tentunya jangan sampai meniadakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai ideologinya. Jangan sampai pula terjadi penjajahan neoliberalisme terhadap Konstitusi NKRI.

Walaupun masih diperlukan waktu dan upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat, kembali ke jati diri bangsa Indonesia merupakan langkah strategis mengembalikan kedaulatan bangsa. Kembali ke UUD 1945 kiranya sudah menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Kembali ke UUD 45 sekali lagi merupakan jiwa dari kembali ke kedaulatan jati diri bangsa.

Dalam konteks itu, perlu adanya langkah-langkah pembentukan gerakan sosial dari seluruh komponen bangsa. Terciptanya sosial *movement*, pembentukan jaringan yang masif, sebagai upaya untuk kembali ke UUD 1945. Disamping diperlu adanya edukasi ke masyarakat untuk membentuk kesadaran kolektif. Masyarakat harus disadarkan secara masif, bahwa kembali ke UUD 1945 merupakan landasan strategis untuk kembali ke kedaulatan bangsa

Menghadapi arus globalisasi dengan segala bentuk modernisasinya dalam semua aspek kehidupan, kita tetap harus mewaspadai dan mempersiapkan diri dengan baik terhadap kehadiran kembali penjajahan dalam bentuk yang berbeda bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Saatnya kita mengajak dan menggelorakan kembali ke UUD 1945 dengan kalimat yang jelas, mengingat spirit konstitusionalisme diberbagai lapisan masyarakat merupakan suatu keharusan disertai keteladanan dari para pemimpin.

Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati,

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita kukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak sebatas tawar-menawar, tetapi dengan tawaran kehidupan budaya dan rasa kebangsaan yang lebih hangat. Senantiasa membangun persamaan dan kebersamaan untuk menuju adicita bangsa, bersatu dalam karya, beragam dalam kreatifitas, mengabdikan dan berbakti untuk bangsa dan negara.

Semua pihak saling menghormati, jadilah bangsa yang hebat bukan karena bisa berbicara keras, bukan karena mampu menggertak, bukan karena mempunyai otot yang kuat, tetapi bangsa yang mampu dan sanggup menghadirkan rasa damai, mencintai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Balai senat UGM, 13 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Key Note Speech
PERINGATAN WORLD KIDNEY DAY 2019
“KIDNEY HEALTH, FOR EVERYONE, EVERYWHERE”**

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *Insya Allah* penuh berkah ini, saya mengajak hadirin dan saudara sekalian untuk memanjatkan puja puji dan syukur kehadiran *Allah SWT*, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti Peringatan *World Kidney Day 2019*, “*Kidney Health, for everyone, everywhere*”. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu guna mengikuti kegiatan yang sangat penting ini.

Hadirin dan Saudara sekalian yang berbahagia,

Seperti kita ketahui, ginjal merupakan organ vital di tubuh yang berfungsi menyaring zat limbah dari darah lalu mengeluarkannya melalui urine, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta masih banyak fungsi yang lain. Namun ginjal yang telah rusak tidak bisa melakukan proses tersebut. Hasilnya, zat limbah dapat menumpuk di tubuh. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi mengancam jiwa.

Dalam keadaan penyakit ginjal tahap akhir/terminal, fungsi-fungsi pembuangan limbah, pengaturan cairan dan elektrolit, harus digantikan dengan metode pengobatan yang dinamakan terapi pengganti ginjal. Ada 3 metode terapi pengganti ginjal yang kita kenal, yaitu hemodialisis/cuci darah, dialisis peritoneal/cuci perut, dan transplantasi ginjal.

Transplantasi ginjal merupakan pilihan terbaik dari tiga pilihan yang ada. Transplantasi ginjal dapat dilakukan baik dari donor ginjal yang hidup ataupun dari donor yang sudah meninggal. Pada saat ini transplantasi ginjal di Indonesia baru melayani transplantasi ginjal dengan donor hidup. Transplantasi merupakan penyakit ginjal tahap akhir yang paling hemat biaya, namun membutuhkan infrastruktur yang kompleks dan tim khusus, ketersediaan donor dan fasilitas dialisis. Persyaratan infrastruktur dan aspek legal hukum serta bias budaya terhadap donasi organ, sering menimbulkan hambatan di banyak negara, menjadikan dialisis sebagai opsi pertama.

Sementara pasien hemodialisis (cuci darah) harus menjalani prosedur ini sepanjang hidupnya, sebagai bentuk terapi pengganti ginjal yang sudah tidak dapat berfungsi secara normal. Penyakit ini terutama pada tahap lanjut, sangat mengganggu kehidupan, aktivitas pekerjaan sehari-hari, serta kualitas hidup penderitanya, pada hal penyakit ginjal kronik merupakan penyakit katastropik nomor 2 yang paling banyak menghabiskan biaya kesehatan setelah penyakit jantung.

Menurut data, setidaknya ada sekitar 850 juta orang di dunia kini diperkirakan menderita penyakit ginjal oleh berbagai macam penyebab. Penyakit Ginjal Kronis (PGK) menyebabkan 2,4 juta kematian per tahun dan menjadi penyebab kematian ke-6. Di Indonesia, prevalensi penyakit ginjal kronik pada populasi di atas usia 15 tahun dalam 5 tahun terakhir, mengalami kenaikan hampir dua kali lipat, yaitu sebesar 3,8 orang per 1000 penduduk pada tahun 2018.

Pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan tidak dapat menutup mata terhadap dampak ekonomi dan sosial dari populasi ini, baik jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir yang harus menjalani perawatan dialisis lebih dimudahkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggung beban biaya dialisis dengan jumlah pasien yang terus melonjak. Biaya dialisis yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dua tahun terakhir sebesar Rp. 3,9 Triliun di tahun 2016, melonjak ke angka Rp. 4,6 Triliun di tahun 2017.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Penyakit ginjal kronik sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan dengan beban biaya kesehatan yang tinggi. Namun penyakit ini dapat dicegah dengan melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan tata laksana penyakit dasar seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan menghindari penggunaan obat-obatan atau zat-zat nefrotoksik/berpotensi merusak ginjal.

Oleh karena itu pada peringatan Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Maret 2019, dan merupakan perayaan Hari Ginjal Sedunia yang ke 14 sejak mulai dikampanyekan pada tahun 2006 ini, didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal, sekaligus untuk mengurangi jumlah maupun dampak penyakit ginjal beserta permasalahan terkaitnya di seluruh dunia. Dengan pemahaman yang baik dari masyarakat, penyakit ginjal kronis juga dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak perlu atau setidaknya menunda menjadi penyakit ginjal tahap akhir.

Tahun 2019 ini, Hari Ginjal Sedunia ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran akan tingginya beban penyakit ginjal di seluruh dunia, dan perlunya strategi untuk pencegahan dan manajemen penyakit ginjal. “Kesehatan ginjal, untuk siapapun, dimanapun”, menyerukan perlindungan kesehatan secara universal / *Universal Health Coverage* (UHC) untuk pencegahan dan pengobatan dini penyakit ginjal.

Secara khusus, peringatan Hari Ginjal Sedunia 2019 menyerukan kepada semua orang untuk mengadvokasi tindakan

konkret disetiap negara untuk meningkatkan perawatan ginjal. Momentum untuk melakukan serangkaian aktivitas bermanfaat, dengan tujuan yang baik, bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan individu dan masyarakat terutama kesehatan ginjal, serta mendorong terwujudnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau seluruh masyarakat.

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sangat penting ini. Selamat memperingati Hari Ginjal Sedunia 2019, semoga *Allah SWT* meridhoi usaha kita semua. Amin.

Sekian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Keynote Speech
MUNAS XI FORUM LEMBAGA LEGISLATIF
MAHASISWA INDONESIA “IMPLEMENTASI NILAI-
NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA
GLOBALISASI UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA
EMAS YANG BERMARTABAT”
Yogyakarta, 22 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati, Rektor INSTIPER Yogyakarta, Dr.Ir.
Purwadi, MS;**

Yang saya hormati, Para Narasumber;

**Koordinator Pusat serta Koordinator Wilayah FL2MI DIY
beserta seluruh Peserta Munas;**

**Hadirin Tamu Undangan dan Saudara-saudara sekalian yang
berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan berkumpul ditempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Terkait dengan tema pertemuan kali ini tentang “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Era Globalisasi Untuk Mewujudkan Indonesia Emas Yang Bermartabat” maka dapat sayaawali dengan melihat kembali sejarah perkembangan bangsa. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno telah mengusulkan dasar falsafah Negara Indonesia, yang istilahnya diperoleh dari ahli bahasa Mr. Muhamad Yamin sebagai *Pancasila*. Selama itu juga Pancasila telah dipandang sebagai sistem filsafat, etika moral, politik, dan Ideologi Nasional. Kemudian pada tanggal 30 September 1965, adalah awal dari Gerakan 30 September atau G30SPKI. Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hari itu, ada enam Jenderal dan beberapa orang [lainnya](#) dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan.

Selanjutnya pada 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau G30S-PKI dan pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk memperingati bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, yang sakti dan tak tergantikan. Kemudian pada tanggal 10 November 1986 Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soeharto sebagai ideologi terbuka, dimana Pancasila dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman yang senantiasa dinamis dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasarnya yang tetap.

Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia, sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Kondisi ini dapat terjadi karena didalam perjalanan sejarah dan adanya kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti adanya keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit

jauh berbeda satu sama lain, tetapi mutlak telah dipersatukan melalui nilai dasar Pancasila.

Hal ini sekiranya telah sesuai dengan Tema Munas kali ini, maka sudah semestinya tema ini dapat memberikan kesadaran bagi kita bersama untuk meresapi nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa tersebut untuk dapat merekat erat sebagai karakter bangsa dan dalam menghadapi era globalisasi untuk mewujudkan Indonesia emas yang bermartabat. Hal ini sangat penting karena dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Menyelamatkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tantangan keruntuhan, maka kita wajib untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental ideologi Pancasila. Seperti halnya kewaspadaan tantangan globalisasi, liberalisasi dan postmodernisme. Kemampuan menghadapi tantangan mendasar yang akan melanda kehidupan bangsa seperti sosial-ekonomi dan politik, bahkan mental dan moral bangsa. Maka benteng terakhir yang diharapkan mampu bertahan ialah dengan keyakinan nasional atas kebenaran dan keunggulan dasar negara Pancasila baik sebagai filsafat hidup bangsa atau *Weltanschauung*, maupun sebagai dasar negara.

Hanya dengan keyakinan nasional inilah manusia Indonesia tegak dan tegar dengan keyakinannya yang benar dan terpercaya, bahwa sistem filsafat Pancasila sebagai bagian dari filsafat Timur, mengandung dan memancarkan identitas dan integritas martabatnya. Secara filosofis-ideologis dan konstitusional berfungsi sebagai asas kerokhanian bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa sekaligus sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Namun demikian, terkadang suatu teori atau konsep sangat bertentangan dengan prakteknya secara nyata. Dimana nilai-nilai luhur Pancasila telah ternoda oleh perilaku KKN, pelanggaran Hak Asasi Manusia, usaha disintegrasi bangsa, mementingkan kelompok, serta pelanggaran terhadap keadilan sosial masyarakat.

Untuk itulah, pembangunan terhadap karakter bangsa berdasarkan nilai dasar Pancasila seharusnya sudah menjadi harga mati pada saat ini. Karena perilaku-perilaku menyimpang yang telah membudaya hanya dapat diberantas secara tuntas dengan mengubah pola pikir dan karakter para pelaku. Terkadang, memang sulit untuk menentukan parameter yang sesuai untuk itu. Terlebih dengan kemajemukan bangsa Indonesia, dan di sinilah kita semestinya kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Dimana sebuah dasar negara seyogyanya tidak hanya dipelajari dan dimengerti saja, akan tetapi yang lebih dari itu adalah pelaksanaannya secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saudara-saudara sekalian,

Sejalan dengan itu yang diperlukan adalah pendidikan tentang Pancasila bagi masyarakat. Pancasila bukanlah suatu dogma dan bukanlah kumpulan rangkaian aturan luhur yang harus dihafal, namun esensinya adalah pendidikan pancasila adalah pendidikan perilaku. Pendidikan untuk terus mengembangkan nilai-nilai instrumen Pancasila yang disesuaikan dengan keadaan bangsa saat ini dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasarnya.

Falsafah pancasila ini harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Jika pendidikan yang kuat tentang falsafah pancasila dilaksanakan dengan sebenar-benarnya maka bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat jauh dari penyimpangan-penyimpangan ekonomi, hukum, sosial dan lain sebagainya, menjalankan hak yang semestinya didapat oleh

masyarakat yang membutuhkan haknya sehingga haknya tidak dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Cara yang mudah dijalankan dalam usaha membangun karakter bangsa dengan falsafah pancasila yaitu dengan mengingat isi falsafah pancasila, memberikan pendidikan falsafah pancasila sejak usia dini hingga dewasa. Menjalankan falsafah pancasila dengan pendidikan yang benar serta kita sebagai individu juga harus berusaha membangun karakter individu yang benar dulu barulah kita bisa membangun karakter bangsa yang kuat dan didorong dengan kepercayaan kepada Tuhan dan agama kita masing-masing.

Apa yang diharapkan tersebut, jelas bahwa pendidikan saat ini tidak hanya berorientasi pada kecakapan intelektual saja, namun juga berorientasi pada kecakapan emosional spiritual. Seimbang antara materi yang berorientasi pada kecakapan intelektual yang notabene pada aspek kognitif sentris dengan materi yang berorientasi pada kecakapan emosional spiritual. Namun menilik praktik pendidikan kita selama ini, juga masih timpang adanya. Oleh karena itulah gagasan pentingnya penguatan karakter bangsa menjadi satu kesatuan yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen penyelenggara pendidikan.

Pembangunan karakter bangsa ini sangat penting artinya karena bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mereka mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian yang dapat saya sampaikan, Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Keynote Speech
REFORMASI BIROKRASI DIY:
SEBUAH HARAPAN MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG
BERORIENTASI
PADA HASIL
Yogyakarta, 14 Maret 2019**

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

**Yang Terhormat, Bapak Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil
Presiden Republik Indonesia;**

**Yang Kami Hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
Yang Kami Hormati Para Narasumber baik dari Dalam Negeri maupun
Luar Negeri;
Para Hadirin sekalian peserta *International Reform Policy Symposium
and Regional Workshop* yang Saya hormati pula.**

Pertama-tama marilah kita Panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga bisa hadir ditempat ini dalam keadaan sehat.

Bapak dan Ibu serta Hadirin sekalian yang berbahagia,

Ijinkanlah pada kesempatan yang baik ini Saya menyampaikan ringkasan sebuah perjalanan panjang pelaksanaan reformasi birokrasi DIY yang telah dimulai sejak tahun 2003 hingga sekarang. Kami menyadari bahwa perubahan sebagai sebuah keniscayaan yang harus dihadapi, oleh

karenanya pelaksanaan reformasi tidak mungkin berhenti dan harus terus dilakukan untuk menjawab tuntutan jaman.

Judul tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan administrasi publik yang dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan, seiring tuntutan dan dinamika masyarakat yang senantiasa berkembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak dua dekade terakhir, pelaksanaan reformasi administrasi publik makin nyata di berbagai negara termasuk Indonesia. Reformasi ini sangat diperlukan mengingat masih banyaknya permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma administrasi publik klasik *the Old Public Administration* yang sejak awal dimotori oleh Wilson pada tahun 1887 terus dikritik oleh banyak pakar, dan lambat laun mulai ditinggalkan karena dianggap tidak lagi mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat yang kian pesat.

Sebagai penggantinya, kemudian diperkenalkan *New Public Management* atau dikenal dengan NPM. Ada sebagian kalangan yang kemudian menyebutnya sebagai *Reinventing Government* yang didasarkan atas pengalaman Eropa, Amerika, dan Australia. Dalam paradigma ini pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, dan beralih kepada orientasi hasil kerja atau sering dikenal sebagai *Result Oriented Government*.

Mensikapi kondisi yang terus berubah dan tantangan yang semakin kompleks, Pemerintah DIY kemudian mulai melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan pada berbagai bidang, meliputi:

- 1) memperbaiki sistem perencanaan dan akuntabilitas;
- 2) merestrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah;
- 3) memperbaiki manajemen SDM;
- 4) melakukan reorientasi pengelolaan keuangan daerah;
- 5) melakukan perbaikan sistem pengawasan; dan
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keenam area perubahan ini selanjutnya menjadi *mainstream* reformasi di DIY yang dikenal dengan Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (*Integrated Civil Service Reform*).

Bapak dan Ibu serta Hadirin sekalian yang berbahagia,

Memang pada tahap awal, birokrasi dijalankan diatas roda aturan hukum (*rule based bureaucracy*). Karena tahapan ini sebagai fondasi sekaligus konsensus bersama untuk meletakkan hukum sebagai panglima. Setelah pranata hukum tertata secara baik selanjutnya dijadikan dasar pelaksanaan *performance based bureaucracy*. Pada fase inilah hasil kerja birokrasi menjadi fokus utama dalam tata kelola pemerintahan (*result oriented government*) yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu sistim pemerintahan yang dinamis yang sering dikenal sebagai *dynamic governance*.

Itulah yang melatarbelakangi mengapa DIY sudah beberapa tahun yang lalu telah mulai melakukan reformasi birokrasi hingga sekarang dan tentunya dimasa-masa yang akan datang. Selanjutnya pada kesempatan yang terbatas ini Saya akan menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

(1) Memperbaiki sistem perencanaan dan akuntabilitas;

Perencanaan menjadi dimensi penting untuk menetapkan program-kegiatan dan strategi pelaksanaannya sehingga benar-benar mampu mengarahkan organisasi mencapai hasil yang telah ditetapkan (*result oriented*). Oleh karenanya dalam perencanaan kinerja harus mampu menjawab:

- (1) kejelasan tujuan (*clarity of objectives*);
- (2) “keterhubungan” melalui logika *cascade*;
- (3) penetapan indikator kinerja yang tepat;
- (4) keterukuran target yang akan dicapai.

Sedang dalam perspektif sistem akuntabilitas maka lima hal yang dijalankan DIY dimulai dari penyusunan perencanaan kinerja, kemudian diperjanjikan, dilakukan pengukuran secara berkala, dilaporkan dan dilakukan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan.

(2) Merestrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah;

Restrukturisasi kelembagaan diletakkan dalam perspektif visi-misi pemerintah daerah atau sering disebut *vision driven organization*. Perspektif ini menstrategikan struktur organisasi yang adaptif terhadap pencapaian visi misi, dengan postur yang tepat fungsi (*right sizing*) sehingga organisasi pemerintah daerah tidak bisa dilepaskan dari strategi pencapaian hasil (*result*). Dalam beberapa literatur sering disebut sebagai *performance based organization*. Dengan struktur yang demikian itulah maka remunerasi dapat diterapkan secara lebih proporsional dan obyektif.

(3) Memperbaiki manajemen SDM;

Berbicara mengenai manajemen sumberdaya manusia, maka orientasi penataan dilakukan berdasarkan *Integrated Human Resources Development Plan* yang didukung oleh *assessment centre* sebagai perangkat rekrutmen dalam penempatan pegawai dalam kerangka pelaksanaan kebijakan *merit system*. Bahkan, dalam upaya mewujudkan SDM professional maka *talent pool* mejadi suatu terobosan yang sudah dirintis untuk mempersiapkan jenjang karier yang tepat (*on the right man on the right job*). Aspek tersebut dapat berjalan secara baik manakala seorang ASN mempunyai kompetensi yang memadai, yakni baik dari aspek manajerial, aspek teknis maupun aspek sosio-kultural.

(4) Melakukan reorientasi pengelolaan keuangan daerah;

Dimensi pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada perencanaan kinerja program dan kegiatan yang diukur atas dasar indikator kinerja pada suatu entitas anggaran (*budget entity*). Dalam perspektif inilah kemudian sering disebut sebagai *performance based budgeting*. Dua satu contoh cara berfikir asimetris dalam pengelolaan anggaran adalah ketika daerah lain ramai membicarakan kinerja serapan anggaran pada waktu itu, Pemda DIY justru saat itu telah mulai memberikan penghargaan kepada instansi atas terjadinya efisiensi penggunaan anggaran. Contoh lain, ketika kemampuan fiskal suatu daerah naik biasanya akan diikuti dengan jumlah kegiatan yang ikut “membengkak”, maka kami justru berpikir sebaliknya. Pada tahun 2013, APBD DIY sekitar 3,4 triliun dengan kegiatan sebanyak 3.145 sementara pada tahun 2017, ketika APBD DIY telah mencapai angka sekitar 5,4 triliun kegiatannya justru dipangkas tinggal menjadi 800an kegiatan. Ada tiga alasan yang melandasi kebijakan tersebut, yakni:

- (1) untuk memperpendek *span of control*;
- (2) memperbesar belanja investasi; dan
- (3) menggeser belanja aparatur ke belanja publik.

(5) Melakukan perbaikan sistem pengawasan;

Orientasi perbaikan sistem pengawasan lebih diarahkan kepada aspek yang sifatnya pencegahan, serta memperkuat sistem kontrol yang basisnya masyarakat. Sebelum Ombudsman Republik Indonesia terbentuk waktu itu, maka DIY telah membentuk Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS). Perubahan ini juga diikuti cara pandang system audit, yang semula basisnya *budget audit* secara bertahap digeser kearah *performance audit*. Oleh karenanya kami telah delapan kali mendapatkan apresiasi Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Perbaikan pelayanan publik merupakan keniscayaan hadirnya pemerintah daerah ditengah-tengah masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka inovasi pelayanan publik menjadi instrumen penting dalam sistem administrasi publik. Oleh karenanya dalam penilaian kinerja instansi pemerintah inovasi menjadi bagian penting bagi setiap instansi pemerintah. Salah satu bentuk pelayanan publik yang menonjol adalah layanan “e-posti”, sebagai bentuk inovasi kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan juga mendekatkan pelayanan melalui Bank Pembangunan Daerah terdekat. Demikian juga untuk merespon berbagai keluhan masyarakat maka telah ada “e-lapor” dan bentuk aplikasi layanan lainnya seperti: jogjaplan, sengguh, jogja-dataku, e-spatial, jogja istimewa dan sebagainya, dalam *mainstream smart province*.

Bapak dan Ibu serta Hadirin sekalian yang berbahagia,

Pada akhirnya, kunci untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang berbasis *result oriented* adalah jika tercipta sinergi antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Perubahan yang harus diperhatikan bagi pemerintah daerah adalah perlunya membangun *moral obligation* dan membangkitkan *sense of mission* dalam setiap pelaksanaan tugasnya dengan memperhatikan *values, structure and organization change, corporate culture, vision and mission driven organization, standardization, competency-profesionalism, and job descriptions*.

Demikian beberapa hal yang dapat Saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan diskusi bagi para perumus kebijakan. Sekali lagi, perubahan adalah sebuah keniscayaan, dan itu adalah cara untuk menatap masa depan dan memastikan generasi berikutnya dapat melanjutkan harapan kita semua sebagai sebuah tanggung jawab sejarah sebagai mana *tag-line* simposium kali ini “*making change-makinghistory*”.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.
Om shanti.. shanti om*

Yogyakarta, 14 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Governor
Of Yogyakarta Special Region**

**Keynote Speech
YOGYAKARTA SPECIAL REGION BUREAUCRATIC REFORM: A
HOPE TO REALIZE RESULT ORIENTED GOVERNMENT
Yogyakarta, March 14th 2019**

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

May peace be upon us all.

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Excellencies:

- **Mr. Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla**, The Vice President of Republic Indonesia;
- The Ministers of “Indonesia Bersatu” Cabinet
- The Speakers from both Domestic and International;
- The Participants of International Reform Policy Symposium and Regional Workshop;
- Ladies and Gentlemen.

Thank God we always pray to the presence of God Almighty, overflowing His mercy and grace, so that today we are still given the opportunity to be present and gather in this place in good health condition.

Ladies and Gentlemen,

In this good opportunity, let me allow to present a summary of a long journey in the implementation of Yogyakarta Special Region bureaucratic reform, which began in 2003 until now. We realized that change is a necessity that must be faced, therefore the implementation of reform is impossible to stop and must continue to be carried out to answer the demands of the times.

The title is motivated by the development of public administration, which from time to time also changes, along with the demands and dynamics of the community that are constantly evolving. As we know that since the last two decades, the implementation of public administration reform has become increasingly evident in various countries including Indonesia. This reform is very necessary according to the many problems and challenges faced in the administration of government. The Old Public Administration's classic paradigm which was initiated by Wilson in the beginning of 1887 continued to be criticized by many experts, and gradually began to be abandoned because it was considered no longer able to accommodate the increasingly rapid needs of society.

Instead, then introduced New Public Management, also known as NPM. There are some people who later call it a Reinventing Government based on European, American and Australian experiences. In this paradigm the government is encouraged to abandon the traditional administrative paradigm which tends to prioritize systems and procedures, and shift to work orientation or often known as Result Oriented Government.

Responding to changing conditions and increasingly complex challenges, the Yogyakarta Special Region Government then began to take various steps to improve in various fields, including:

- (1) improving the planning and accountability system;
- (2) restructuring regional government institutions;
- (3) improving HR management;
- (4) reorient regional financial management;
- (5) make improvements to the supervision system; and
- (6) improve the quality of public services.

These six areas of change have subsequently become mainstream reforms in Yogyakarta Special Region known as Integrated Civil Service Reform.

Ladies and Gentlemen,

Indeed, at the initial stage, the bureaucracy was run on the rule of law (rule based bureaucracy). Because this stage is a foundation as well as a joint consensus to put the law as commander. After a well-organized legal institution is then used as the basis for implementing performance-based bureaucracy. In this phase the work of bureaucracy becomes the main focus in governance (result oriented government) which in the end will produce a dynamic government system that is often known as dynamic governance.

That is the background of why Yogyakarta Special Region has several years ago started bureaucratic reform until now and of course in the future. Continuing on this limited opportunity, I will convey a number of steps that have been taken to realize a results-oriented government, as follows:

1) Improving the planning and accountability system;

Planning becomes an important dimension to determine the programs and implementation strategies so that they are truly able to direct the organization to achieve results that have been determined (result oriented). Therefore in performance planning must be able to answer:

- (1) clarity of objectives;
- (2) connectedness through the logic of the cascade;
- (3) establishment of appropriate performance indicators; (4) the measurement of targets to be achieved.

While in the perspective of the accountability system, the five things that are carried out by Yogyakarta Special Region are started from the preparation of performance planning, then agreed, periodic measurements are taken, reported and evaluations are carried out to improve planning and implementation.

2) Restructuring regional government institutions;

Institutional restructuring is placed in the perspective of regional government vision and mission or often called a vision driven organization. This perspective strategies an adaptive organizational structure towards achieving the vision and mission, with the right posture (right sizing) so that local government organizations cannot be separated from the strategy of achieving results. In some literature it is often referred to as a performance based organization. With this structure, the remuneration can be applied more proportionally and objectively.

3) Improving HR management;

Speaking of human resource management, structuring orientation is carried out based on the Integrated Human Resources Development Plan which is supported by the assessment center as a recruitment tool in the placement of employees within the framework of implementing the merit system policy. In fact, in an effort to realize professional HR, the talent pool has become a breakthrough that has been initiated to prepare the right man on the right job. This aspect can work well when an ASN has adequate competencies, namely from managerial aspects, technical aspects and socio-cultural aspects.

4) Reorient regional financial management;

The dimensions of regional financial management are based on program performance planning and activities that are measured on the basis of performance indicators in a budget entity. In this perspective, it is often referred to as performance based budgeting. Two examples of asymmetrical thinking in budget management are when other regions are busy talking about the performance of budget absorption at that time, the Yogyakarta Special Region Government at that time has begun to give awards to agencies for the efficient use of the budget. Another example, when the fiscal capacity of a region rises will usually be followed by the number of activities that participate "swell", so we actually think otherwise. In 2013, the Yogyakarta Special Region Regional Budget was around 3.4 trillion with activities totaling 3,145 while in 2017 when the Yogyakarta Special Region Regional budget had reached around 5.4 trillion, its activities were cut down to around 800 activities. There are three reasons underlying this policy, namely:

- (1) to shorten the span of control;
- (2) increase investment spending; and
- (3) shifting apparatus spending to public expenditure.

5) Carry out improvements to the supervision system;

The orientation of the improvement of the supervision system is more directed to the aspects of prevention, as well as strengthening the control system that is based on the community. Before the Ombudsman of the Republic of Indonesia was formed at that time, Yogyakarta Special Region had formed the Regional Ombudsman Institute and the Private Ombudsman Institute. This change was also followed by the perspective of the audit system, which was originally based on the audit budget being gradually shifted towards performance audits. Therefore, we have received the Unqualified Opinion eight times in regional financial management from the Indonesian Supreme Audit Institution.

6) Improve the quality of public services;

Improving public services is a necessity for the presence of regional governments in the midst of society. To answer this challenge, the innovation of public services becomes an important instrument in the public administration system. Therefore, in evaluating the performance of government agencies, innovation is an important part of every government agency. One form of public service that stands out is the "e-posti" service, as a form of innovation in the ease of payment of Automated Teller Machine-based motor vehicle tax and also bringing services closer to the nearest Regional Development Bank. Likewise, to

respond to various community complaints, there has been an "e-report" and other forms of service applications such as jogjaplan, sengguh, jogja-dataku, e-spatial, jogja istimewa and so on, in mainstream smart province.

Ladies and Gentlemen,

In the end, the key to realizing good governance and clean government based on result oriented if there is a synergy between the role of government, private sector and society. The change that must be considered for regional governments is the need to build a moral obligation and generate sense of mission in every implementation of their duties by paying attention to values, structure and organization change, corporate culture, vision and mission driven organizations, standardization, competency-professionalism, and job descriptions.

These are some of the things that I can convey, hopefully it will be useful and can be a material discussion for policy makers. Again, change is a necessity, and it is a way to look at the future and ensure that the next generation can continue our hopes as a historical responsibility as this symposium tag-line is "**making change-making history**".

Thank you.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.
Om Shanti, Shanti om.*

Yogyakarta, March 14th 2019

GOVERNOR OF
YOGYAKARTA SPECIAL REGION

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Narasumber
PERINGATAN HARI AIR DUNIA XXVII 2019
“AIR UNSUR ESENSIAL SEBAGAI SUMBER HIDUP DAN
PENGHIDUPAN MENUJU HAMEMAYU HAYUNING
BAWANA”
Giwangan Yogyakarta, 31 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Para Narasumber;**
- **Hadirin Tamu Undangan dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Sebagaimana telah kita sadari bersama, bahwa air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan kita setelah udara, karena air dipergunakan oleh manusia untuk keperluan bagi kelangsungan kehidupannya, seperti untuk minum,

memasak, mandi, mencuci. Juga dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian, industri, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Tidak hanya penting bagi manusia, air juga merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup.

Pemanfaatan air sebagai kebutuhan primer bagi kehidupan semua makhluk di muka bumi ini, maka pemanfaatannya harus bijaksana dan diperlukan pembangunan yang tepat dalam pengelolaan air, karena sering kali sumber daya air diperlakukan sebagai sumber mineral sehingga dieksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan konsep pelestariannya. Dewasa ini permasalahan yang cenderung dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya air meliputi: adanya kekeringan di musim kemarau dan terjadi banjir di musim hujan; persaingan dan perebutan air antara daerah hulu dan hilir atau konflik antara berbagai sektor; penggunaan air yang berlebihan dan kurang efisien; penyempitan dan pendangkalan sungai, danau karena desakan lahan untuk pemukiman dan industri; pencemaran air permukaan dan air tanah serta erosi sebagai akibat penggundulan hutan, dan sebagainya.

Untuk itulah, atas nama Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik serta menyampaikan ucapan “*Selamat*” memperingati Hari Air Dunia 2019, dengan tema “*Air Unsur Esensial Sebagai Sumber Hidup dan Penghidupan Menuju Hamemayu Hayuning Bawana*”, semoga dengan momentum ini kita dapat mengelola sumberdaya air dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat dengan baik dan berkesinambungan. Pengelolaan sumber daya air ini, meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Dimana sumber daya air ini harus dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Maka negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari serta melakukan pengaturan hak atas air.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Pembangunan yang selama ini dilakukan secara konvensional, dengan cara memacu pertumbuhan dan aktivitas ekonomi telah mengakibatkan terjadinya peningkatan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Hal ini mengakibatkan adanya kerusakan alam, termasuk didalamnya kerusakan sumber daya air, baik secara langsung maupun secara bertahap. Dari masalah inilah perlu adanya pemikiran untuk mempertimbangkan kelestarian SDA dan lingkungan agar pembangunan ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

Yaitu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk kebutuhan akan air. Sehingga pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan, yang merupakan upaya sadar dan terencana, dengan memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya air ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Berangkat dari kesadaran masyarakat serta pemerintah bahwa sumber daya air sebagai unsur lingkungan yang sangat vital dan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat menjamin berlanjutnya kehidupan. Maka keberadaan Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta (AKSY) ini, dapat sebagai pelopor dalam rangka membangun kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai untuk mengembalikan fungsi dan manfaat sungai sebagaimana yang seharusnya.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Giwangan Yogyakarta, 31 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Pidato Pada Acara
PEMBUKAAN
*THE 6th ASEAN OSHNET CONFERENCE***

Yogyakarta, 28 Maret 2019

*Bismillahirrahmirrahim,
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu
Namo Budhaya*

Yang Terhormat,

- 1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;**
- 2. Deputi Sekretaris Jendral dari Sekretariat ASEAN;**
- 3. Delegasi ASEAN;**
- 4. ASEAN Dialog Partner dari China, Jepang, Korea, ILO, IALI, dan APOSHO;**
- 5. Direktur ILO Jakarta; dan**
- 6. Seluruh peserta yang tidak bisa disebutkan satu per satu.**

Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan untuk menghadiri *The 6th ASEAN OSHNET Conference: OSH Data Collection and Analysis, Including on Work Injury Compensation Systems*, Tahun 2019 di Yogyakarta.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan; Deputi Sekjen dari Sekretariat ASEAN; Ibu Michiko Myiamoto-Direktur ILO Jakarta; Delegasi CBM ke-20 dari negara-negara ASEAN, ASEAN Dialog Partner, Asosiasi Internasional; dan seluruh peserta konferensi yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini.

Bapak Menteri dan Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Merupakan suatu kehormatan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkesempatan menjadi tuan rumah sekaligus menerima delegasi dari ASEAN dan peserta konferensi. Untuk itu, Kami mengucapkan selamat kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang sukses menyelenggarakan pertemuan *The 20th ASEAN OSHNET Coordinating Board Meeting dan The 6th ASEAN OSHNET Conference: OSH Data Collection and Analysis, Including and Work Injury Compensation Systems*; dengan baik.

Kami percaya bahwa melalui pelaksanaan pertemuan kali ini, seluruh peserta dapat menyerap secara langsung berbagai informasi aktual mengenai *OSH Data Collection and Analysis, Including on Work Injury Compensation Systems*, sebagai salah satu rekomendasi *ASEAN OSHNET Work Plan*.

Seperti diketahui, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata cukup strategis dan menjadi destinasi wisata kedua setelah Bali. Wilayah ini memiliki kekhasan pada aspek kekayaan budaya, lingkungan alam yang eksotik dengan adat istiadat yang masih terjaga dengan cukup baik, dan berada pada posisi geografis yang mudah terjangkau, sehingga menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Banyak hal yang dapat dieksplor dari seantero Yogyakarta, karena wilayah ini memiliki jejak peradaban masa lalu yang megah, seperti: Candi Prambanan, Situs Ratu Boko, hingga Keraton Yogyakarta. Peradaban masa lalu menjadi bukti yang terus hidup melintasi ruang dan waktu, hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat yang terus terjaga, disamping keelokan wisata alam yang indah. Disini juga memiliki Gunung Merapi yang menjadi bagian dari keseimbangan ekologis dan budaya dalam konteks keharmonisan antara manusia dan alam, selain keindahan Pantai Selatan di sepanjang pesisir Yogyakarta selatan.

Bapak Menteri dan Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Sebelum Saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan Kami mengucapkan SELAMAT melaksanakan konferensi internasional skala ASEAN ini. Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan inspirasi bagi seluruh peserta dan keberlanjutan persahabatan negara-negara ASEAN. Kami berharap seluruh delegasi dan peserta konferensi mendapatkan kenangan yang indah tentang Yogyakarta.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Governor
Of Yogyakarta Special Region**

**Remarks
THE OPENING OF
THE 6th OSHNET CONFERENCE**

Yogyakarta, March 28th 2019

*Bismillahirrahmirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
May peace be upon us all.
Om Swastiastu
Namo Budhaya*

Excellencies:

- 1. Minister of Manpower of the Republic of Indonesia;**
- 2. Deputy Secretary General of the ASEAN Secretariat;**
- 3. ASEAN Delegation;**
- 4. ASEAN Dialog Partners from China, Japan, Korea, ILO, IALI, and APOSHO;**
- 5. Director of ILO Jakarta; and**
- 6. All participants who cannot be mentioned one by one.**

First of all, let us praise God the Almighty who has bestowed His blessings upon us and the joy of all of us can still gather without any barriers at all and in good health in the opening of The 6th ASEAN OSHNET Conference: OSH Data Collection and Analysis, Including on Work Injury Compensation Systems 2019 in Yogyakarta

On this happy occasion, We would like to welcome and thank Mr. Hanif Dhakiri-Minister of Manpower; Deputy Secretary General of the ASEAN Secretariat; Madam Michiko Myiamoto-Director of ILO Jakarta; 20th CBM Delegation from ASEAN countries, ASEAN Dialogue Partner, International Association; and all conference participants who have taken the time to attend this event.

Mr. Minister and Ladies and Gentlemen,

It is an honor for the Yogyakarta Special Region, which had the opportunity to host as well as receive delegations from ASEAN and conference participants. To that end, we congratulate the Ministry of Manpower who successfully held well meetings of the 20th ASEAN OSHNET Coordinating Board Meeting and The 6th ASEAN OSHNET Conference: OSH Data Collection and Analysis, Including and Work Injury Compensation Systems.

We believe that through the implementation of this meeting, all participants can directly absorb various actual information about OSH Data Collection and Analysis, including on Work Injury Compensation Systems, as one of the recommendations of the ASEAN OSHNET Work Plan.

As is known, the Yogyakarta Special Region is one of the regions that has a strategic tourism potential and is the second tourist destination after Bali. This region has a specificity in aspects of cultural wealth, an exotic natural environment with customs that are still maintained quite well, and is in a geographical position that is easily affordable, so that it attracts tourists to visit it.

There are many things that can be explored from all over Yogyakarta, because this region has a trace of a magnificent past civilization, such as: Prambanan Temple, Ratu Boko Site, and the Yogyakarta Palace. The civilization of the past is a proof that

continues to live across space and time, until now in the lives of people who continue to be maintained, in addition to the beauty of beautiful natural attractions. Here also has Mount Merapi which is part of ecological and cultural balance in the context of harmony between humans and nature, in addition to the beauty of the South Coast along the coast of southern Yogyakarta.

Mr. Minister and Ladies and Gentlemen,

Before I conclude this remarks, please allow us to say CONGRATULATION to holding this ASEAN scale international conference. Hopefully the implementation of this activity can provide inspiration for all participants and the sustainability of the friendship of ASEAN countries. We hope all delegates and conference participants will get wonderful memories of Yogyakarta.

Thank you.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Yogyakarta, March 28th 2019

GOVERNOR OF
YOGYAKARTA SPECIAL REGION

HAMENGKU BUWONO X



Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

SAMBUTAN PADA KEGIATAN
PEMBINAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PPNS
BADAN/DINAS/BALAI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati;

Hadirin dan para peserta pembinaan yang berbahagia,

Pada hari yang *Insyah Allah* penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puja puji dan syukur ke hadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada bangsa dan negara tercinta ini.

Hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pula, kita yang telah diberikan tetesan pengetahuan dan sedikit penguasaan atas teknologi informasi, pada hari ini dapat bersama-sama berkumpul ditempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan Pembinaan Peningkatan kemampuan Penyidikan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan/Dinas/Balai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertama-tama saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Pembinaan Peningkatan kemampuan Penyidikan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan/Dinas/Balai yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Harapannya kegiatan yang sangat penting ini dapat memberikan manfaat bagi peserta, utamanya dalam hal kemampuan penyidikan.

Hadirin sekalian,

Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis adalah fungsi kepolisian yang mempunyai implikasi pro justitia yang terdiri atas fungsi kepolisian umum yang diemban oleh Polri dan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidang teknisnya masing-masing.

Pengemban fungsi kepolisian khusus yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan represif yustisial, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Maka Polri selaku pengemban fungsi kepolisian umum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri).

Sedangkan PPNS sebagai salah satu pengemban fungsi kepolisian khusus, berdasarkan KUHAP hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Namun dalam praktek di lapangan, seringkali pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS belum sesuai ketentuan yang ada, misalnya PPNS tidak segera menyerahkan

surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Bahkan ada juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ataupun berkas perkara yang langsung diserahkan oleh PPNS kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri selaku korwas PPNS, serta tidak tertibnya administrasi penyidikan oleh PPNS. Untuk itu dalam melakukan penegakan hukum, keberadaan dan peranan PPNS perlu ditingkatkan kinerjanya, sehingga mampu menyelesaikan tugas dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Peningkatan kinerja dan sinergitas bisa diwujudkan melalui Pembinaan Peningkatan Kemampuan (Binkatpuan), baik bagi penyidik Polri maupun PPNS, seperti yang diselenggarakan mulai hari ini. Hal itu mengingatkan Binkatpuan memiliki makna yang sangat penting dan strategis. **Penting**, karena dapat menghantarkan para penyidik Polri maupun PPNS dalam melaksanakan proses penyidikan yang semakin professional, modern dan terpercaya. **Strategis**, karena untuk mewujudkan kepastian hukum, sehingga tercapai penegakan hukum yang adil, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, sesuai dengan Undang Undang dan Kesetaraan Perlakuan. Dalam kaitan itu maka penegakan hukum harus kita dorong agar berfungsi optimal, selain mengharuskan adanya sinergitas dalam pelaksanaan tugas para penyidik.

Diharapkan kegiatan yang diselenggarakan ini dapat memecahkan masalah dalam hubungan kerja antara penyidik [PPNS](#) dengan penyidik Polri, sehingga keduanya dapat melaksanakan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel serta saling berkoordinasi, sekaligus mampu

menyelesaikan permasalahan secara baik. Dalam arti, antara Polri dan [PPNS](#) mempunyai kemampuan dalam hal penyidikan.

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan harapan, melalui kegiatan ini diperoleh adanya penguatan koordinasi dan sinergisitas antara penyidik Polri dan PPNS dalam menangani pelanggaran hukum di DIY.

Sekian. Terima kasih perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan Selamat Datang
THE 6th OSHNET CONFERENCE
Yogyakarta, 28 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Terhormat, Bapak M. Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

Yang Kami Hormati,

- Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste;
- Deputi Sekjen ASEAN;
- Para delegasi negara peserta *The 6th OSHNET Conference*;
- Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang kami hormati pula.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara pembukaan *The 6th OSHNET Conference* dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya mengucapkan “Selamat Datang” di Yogyakarta kepada Bapak Menteri beserta seluruh Delegasi peserta konferensi. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi Kami dapat hadir dan berjumpa dengan hadirin

sekalian serta sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami, Yogyakarta dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi bertaraf internasional.

Bapak dan Ibu serta Hadirin sekalian yang berbahagia,

Keselamatan dan kesehatan kerja pada banyak perusahaan di dunia masih dilihat sebelah mata. Banyak perusahaan yang menganggap masalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah masalah ringan sehingga tidak perlu fokus dalam menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara khusus.

Sumberdaya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam proses produksi. Dari semua faktor produksi seperti tenaga manusia, bahan baku, bahan penolong, uang, mesin, metode dan sebagainya, manusia merupakan faktor yang paling utama, bukan saja karena manusia dapat mempengaruhi jumlah mutu produk yang dihasilkan, akan tetapi karena manusia pula yang menentukan penggunaan faktor-faktor lain tersebut.

Penerapan dengan baik akan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua elemen yang terlibat didalamnya seperti pihak perusahaan atau wirausaha, pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan.

Berpijak dari hal tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mendukung adanya *The 6th OSHNET Conference* sebagai salah satu upaya sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan implementasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan kondusif sehingga pekerja dapat memberikan kontribusi optimal dengan kondisi kesehatan yang prima.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan kemudahan dalam setiap langkah dan upaya kita. Amien. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
APEL DALAM RANGKA
HUT TAGANA KE-15
Kalasan Sleman, 17 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Direktur PSKBA Ditjen Linjamsos Kementerian Sosial RI;**
- **Yang saya hormati, Jajaran FORKORPIMDA DIY;**
- **Yang saya hormati, Para Bupati/Walikota beserta Jajaran;**
- **Para Peserta Apel HUT Tagana ke-15 yang saya banggakan;**
- **Hadirin Tamu Undangan serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pertama-tama atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan ucapan "Selamat Ulang Tahun ke-15" kepada Taruna Siaga Bencana (TAGANA) DIY yang telah melaksanakan ketugasan dan pengabdian secara profesional, akuntabel dan eksistensinya tidak diragukan lagi di lingkungan masyarakat maupun pada tingkat nasional. Semoga TAGANA terus bersemangat di dalam pengembangan wawasan pengurangan resiko bencana, pengelolaan pengungsi dan logistik, dan menjadi akselerator bagi upaya optimalisasi penanggulangan bencana alam yang berbasis masyarakat maupun ketugasan lainnya.

Saudara-saudara sekalian,

Hakekat dari tujuan penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi resiko dan menekan dampak bencana terhadap masyarakat. Oleh karena itu segala aspek maupun proses yang terkait dengan upaya-upaya penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka segala upaya penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Agar masyarakat memahami tentang peran dan fungsinya dalam penanggulangan bencana, maka perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan seperti penguatan, pemantapan dan pelatihan sesuai dengan budaya, kearifan lokal serta kemampuan dan potensi masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat akan lebih mandiri, lebih kuat, lebih sigap, lebih terlatih dan lebih siap untuk menghadapi bencana mendatang tanpa bergantung kepada pihak lain kecuali kondisi khusus.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana diperlukan basis yang kuat dari kalangan masyarakat itu sendiri agar penanggulangan bencana tidak hanya menjadi kebutuhan sampingan tetapi melembaga sebagai bagian dari kehidupannya. Kelompok basis yang dianggap paling kuat, paling menonjol dan militan serta memiliki spirit yang tinggi adalah dari kelompok generasi muda yang keberadaan mereka ada di seluruh pelosok desa di seluruh tanah air.

Untuk itulah keberadaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) keberadaannya sangat penting dan merupakan garda terdepan untuk memberdayakan potensi generasi muda dalam penanggulangan bencana sebagai personal penanggulangan bencana berbasis masyarakat terlatih.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Salah satu potensi kesiapsiagaan yang harus dipersiapkan dengan potensi yang cukup besar adalah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di masyarakat yang didukung oleh kemampuan pemerintah. Sehingga peran masyarakat tidak lagi mejadi obyek tapi sebaliknya harus menjadi subyek

dan pelaku utama. Tujuan utama memberikan peran yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat itu sendiri untuk menghadapi bencana yang akan datang. Sehingga kemampuan masyarakat baik secara teknis maupun manajerial harus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Pemerintah adalah penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana dan pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sehingga antara kemampuan pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan kolaborasi yang tidak bisa ditawar lagi. Artinya pemerintah sebagai regulator memberikan dukungan untuk mempersiapkan masyarakat sebagai pelaku utama agar memiliki ketahanan dan kemampuan untuk menghadapi bencana yang akan datang. Selanjutnya diharapkan masyarakat mampu mengelola dirinya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik bencana serta situasi yang ada di lingkungannya. Dengan demikian diharapkan penanggulangan bencana sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat itu sendiri.

Terjadinya bencana di wilayah DIY sekiranya telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Untuk itulah kita harus membudayakan hidup dengan kesiapan dan antisipatif terhadap bencana. Program-program dan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana perlu untuk dirintis dan dikembangkan. Pendidikan sadar bencana dan latihan menghadapi bencana terus dibiasakan. Pusat-pusat studi dan pelatihan menghadapi bencana wajib untuk dimunculkan dan didukung sepenuhnya. Kebijakan serta manajemen penanggulangan bencana juga mesti segera ditata dan dilahirkan.

Dengan demikian kita sangat memerlukan adanya manajemen ancaman bahaya bencana geologi sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak negatif apabila bahaya bencana geologi itu benar-benar terjadi. Dengan merencanakan bagaimana menanggapi bencana geologi bila terjadi (*preparadnes*) atau kesiagaan bencana. Karakter dari setiap macam bencana itu perlu dipahami agar kita dapat menyusun strategi menghadapi ancamannya. Memperkirakan waktu kejadian dan pemetaan daerah-daerah yang terancam serta aktifitas mitigasi bencana berdasarkan karakter dari bencana yang terjadi.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Untuk itulah, saya menyambut baik diadakannya Apel HUT TAGANA ke-15 ini, kegiatan ini sangat penting dalam upaya untuk menyatukan semangat, pandangan, dan tindakan TAGANA di dalam

bergerak dan mendukung terhadap upaya-upaya pengurangan/penanggulangan bencana di wilayah kita, dengan kebijakan penanganan bencana yang komprehensif dan integratif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kalasan Sleman, 17 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
BAZAAR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH UNTUK NEGERI
Yogyakarta, 16 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang Saya hormati,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Bazaar Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Negeri dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan masyarakat, Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan "Terima Kasih" kepada PT. HM Sampoerna Tbk. dan *Business and Export Development Organization* atas terselenggaranya acara ini.

Hadirin dan Tamu Undangan sekalian,

Kita semua menyadari dalam persaingan perdagangan salah satunya ditentukan pada keunggulan produk yang dihasilkan. Dalam konteks pengembangan keunggulan tersebut, maka pemerintah mulai mengembangkan konsep produk unggulan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi produk unggulan terutama yang berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai proses pengembangan sumber daya lokal dan optimalisasi atas potensi ekonomi daerah.

Sebagai suatu strategi perdagangan, pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan, karena dianggap bahwa suatu daerah yang menerapkan pola ini relatif lebih "mandiri" dalam pengembangan

ekonominya. Pengembangan produk unggulan dan pengembangan UMKM dapat merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan perekonomian daerah. Terlebih lagi pada daerah yang tertinggal atau mempunyai ketimpangan ekonomi terhadap daerah/wilayah lainnya.

Selain itu, setiap daerah juga memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi tersebut sangat beragam mulai dari perkembangan pariwisata, pertanian hingga industri, yang bahkan bisa berorientasi untuk ekspor. Dengan demikian, maka masa depan Indonesia ada di daerah dan pemerintah beserta pemangku kepentingan lainnya harus menyadari dan mengutamakan pentingnya potensi lokal.

Hadirin sekalian,

Secara umum peran pendampingan oleh pemerintah dan swasta memang dibutuhkan dalam pengembangan UMKM supaya dapat mengembangkan usahanya. Peran utama pemerintah yaitu melalui penciptaan iklim UMKM yang kondusif melalui langkah-langkah strategis yang mendukung UMKM seperti keamanan dan ketentraman menjalankan usaha, keringanan pajak, penyederhanaan prosedur pengajuan ijin usaha, dan lainnya.

Selain itu, pemerintah dan swasta juga bisa memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM terkait aspek manajemen, kewirausahaan, administrasi, keterampilan dan keahlian pengembangan usaha. Dukungan dari pemerintah dan swasta inipun dirasa penting mengingat kesuksesan UMKM dapat menggairahkan kembali roda perekonomian bangsa. Terlebih bagi sejumlah UMKM yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik serta mendukung sepenuhnya atas peran serta swasta dalam hal ini PT. HM Sampoerna Tbk. dan *Business and Export Development Organization* yang telah melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapabilitas ketrampilan UMKM melalui program *SCORE Plus – Wood and Water Hyacinth*.

Melalui program *SCORE Plus – Wood and Water Hyacinth* tersebut, kami berharap para peserta program dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya seperti dapat membuka peluang dan jejaring pasar. Selain itu

kepada peserta program juga dapat menularkan ilmu pelatihan yang telah diajarkan ke lebih banyak penerima manfaat sesama UMKM lain.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridho-Nya seraya mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, **Bazaar Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Negeri**, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
GALA DINNER
INTERNATIONAL COUNCIL FOR SMALL BUSINESS
Bangsal Kepatihan, 30 Maret 2019**

*Bismillahirrahmirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu
Namo Budhaya*

Yang Kami Hormati,

- Jajaran Ketua dan Pengurus *International Council For Small Business* se-Indonesia;
- Perwakilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Anggota *International Council For Small Business* se-Indonesia;
- Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang kami hormati pula.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara *Gala Dinner International Council For Small Business* dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Sebagai pengantar jamuan makan malam ini, ijinkanlah Saya sedikit bercerita mengenai Yogyakarta. Yogyakarta (atau yang dikenal dengan nama **Jogja Istimewa**) adalah kota yang memiliki sejumlah atribut khusus. Yogyakarta dikenal sebagai kota perjuangan, kota pendidikan, dan sebagai pusat utama budaya dan tradisi Jawa. Daya tarik kota ini mencakup atraksi yang tak berujung dan suasana terbaik. Keindahan alam, warisan budaya Jawa, budaya lokal, kesenian dan tradisi, dan juga kelezatan kuliner yang ditawarkan oleh kota ini, membuat Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

Yogyakarta juga populer sebagai kota pendidikan atau kota universitas, dimana pelajar ataupun mahasiswa dari seluruh Indonesia dari berbagai latar belakang etnis berduyun-duyun datang untuk belajar dan bersekolah disini. Karena hal tersebut, Yogyakarta juga dikenal sebagai miniatur Indonesia.

Yogyakarta terkenal sebagai pusat utama budaya dan tradisi Jawa. Budaya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Yogyakarta. Selain pluralisme, orang-orang Yogyakarta sangat terkenal dengan karakteristik rendah hati mereka, sopan santun dan sikap mereka yang ramah. Setiap pengunjung akan disambut pada bagian kota ini dimanapun. Banyak yang mengatakan bahwa satu kali kunjungan ke Jogja tidak pernah cukup.

Oleh karena itu, Saya mengundang Anda untuk menjelajahi Yogyakarta agar dapat mengungkap kekayaan seni yang menarik, atraksi yang menghibur, budaya yang penuh warna, orang-orang yang ramah dan pilihan kuliner yang tak ada habisnya.

Demikian beberapa hal yang dapat Saya sampaikan untuk menghantarkan jamuan makan malam ini. Semoga suasana Yogyakarta yang hangat bersahabat dapat membuat Saudara sekalian nyaman dan betah selama berada disini dan berkenan

berkunjung kembali menjelajahi Yogyakarta pada waktu yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Bangsai Kepatihan, 30 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
GALADINNER
RAPAT KERJA NASIONAL
INTERNATIONAL COUNCIL FOR
SMALL BUSINESS 2019**

Yogyakarta, 30 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu.

Namo Budhaya.

Yang Kami Hormati,

- Jajaran Ketua dan Pengurus *International Council For Small Business* se-Indonesia;

- Perwakilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Anggota *International Council For Small Business* se-Indonesia;
- Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang Kami hormati pula.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara *Gala Dinner* Rapat Kerja Nasional *International Council For Small Business* 2019 dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya mengucapkan "Selamat Datang" di Yogyakarta kepada seluruh peserta Rapat Kerja Nasional *International Council For Small Business* 2019. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi Kami dapat hadir dan berjumpa dengan hadirin sekalian.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Sebagai pengantar jamuan makan malam ini, izinkanlah Saya sedikit bercerita mengenai Yogyakarta. Yogyakarta (atau yang dikenal dengan nama **Jogja Istimewa**) adalah kota yang memiliki sejumlah atribut khusus. Yogyakarta dikenal sebagai kota perjuangan, kota pendidikan,

dan sebagai pusat utama budaya dan tradisi Jawa. Daya tarik kota ini mencakup atraksi yang tak berujung dan suasana terbaik.

Keindahan alam, warisan budaya Jawa, budaya lokal, kesenian dan tradisi, dan juga kelezatan kuliner yang ditawarkan oleh kota ini, membuat Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

Yogyakarta juga populer sebagai kota pendidikan atau kota universitas, dimana pelajar ataupun mahasiswa dari seluruh Indonesia dari berbagai latar belakang etnis berduyun-duyun datang untuk belajar dan bersekolah disini. Karena hal tersebut, Yogyakarta juga dikenal sebagai miniatur Indonesia.

Yogyakarta terkenal sebagai pusat utama budaya dan tradisi Jawa. Budaya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Yogyakarta. Selain pluralisme, orang-orang Yogyakarta sangat terkenal dengan karakteristik rendah hati mereka, sopan santun dan sikap mereka yang ramah. Setiap pengunjung akan disambut pada bagian kota ini dimanapun. Banyak yang mengatakan bahwa satu kali kunjungan ke Jogja tidak pernah cukup.

Oleh karena itu, Saya mengundang Anda untuk menjelajahi Yogyakarta agar dapat mengungkap kekayaan seni yang menarik, atraksi yang menghibur, budaya yang penuh warna, orang-orang yang ramah dan pilihan kuliner yang tak ada habisnya.

Demikian yang dapat Saya sampaikan untuk menghantarkan jamuan makan malam. Semoga suasana Yogyakarta yang hangat bersahabat dapat membuat Bapak/Ibu/Saudara sekalian nyaman dan betah selama berada disini dan berkenan berkunjung kembali menjelajahi Yogyakarta pada waktu yang akan datang. Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
*INDONESIA BEST OF AWARD 2019***

Yogyakarta, 1 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang Saya hormati,

Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridho dan karunia-Nya hari ini kita dapat bersama-sama hadir di acara malam penganugerahan *Indonesia Best Of Award 2019* ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pertama-tama, atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya mengucapkan "Selamat Datang" di Yogyakarta kepada seluruh hadirin. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi Kami dapat hadir dan berjumpa dengan Bapak/Ibu/Saudara sekalian.

Selanjutnya, kami juga menyampaikan ucapan “Terima Kasih” dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Venna Event Management yang merupakan sebuah lembaga independen bergerak di bidang sosial, atas terselenggaranya acara pemberian penghargaan ini. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami, Yogyakarta dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan malam penghargaan ini.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan dan meliputi seluruh tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan tujuan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Tanah Air, dengan melibatkan sektor formal, informal dan seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan bagi pembangunan bangsa Indonesia sejatinya bukan dikarenakan keterbatasan sumber daya dimiliki. Kita sebenarnya mempunyai ketersediaan sumber daya yang melimpah dan tidak terbatas, baik yang berupa potensi kekayaan alam maupun sumber daya manusia. Hanya saja, untuk menjadi sebuah bangsa maju dengan laju pembangunan yang pesat, sumber-sumber daya tersebut harus bernilai tinggi. Dengan demikian akan mampu menciptakan kesempatan perubahan dan kesempatan pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

Untuk mempercepat dan memperluas pembangunan, bangsa Indonesia membutuhkan peranan para perusahaan, pengusaha, wirausaha, pelaku UMKM, pendidik dan tokoh profesional dengan berbagai macam kategori dan sebagainya

sebagai agen perubahan untuk berkiprah, baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Frase kuncinya adalah mengejar kesempatan untuk mewujudkan perbaikan. Agen perubahan tersebut adalah motor penggerak pembangunan bangsa, karena terbukti mampu mendorong kemandirian bangsa dan kedaulatan ekonomi melalui berbagai sektor.

Hadirin sekalian,

Momentum pemberian penghargaan pada malam hari ini, hendaknya dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata para agen perubahan tersebut dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri. Karena itu, penyelenggaraan *Indonesia Best Of Award 2019* ini harus lebih dari sekedar acara yang bersifat seremonial belaka. Akan tetapi, harus benar-benar mampu berkontribusi dalam mempertegas komitmen para penerima penghargaan, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan bangsa melalui karya nyata.

Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu bentuk inspirasi, yang harapannya akan mampu memotivasi semua pihak dalam meningkatkan daya saing, kredibilitas dan keunggulan kompetitif mereka pada taraf lokal, nasional maupun internasional. Selain itu, kami memandang kegiatan ini sangat strategis dalam menunjang suksesnya program Pembangunan Nasional, serta dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi era persaingan global.

Akhir kata, Saya ucapkan “Selamat” kepada para penerima *Indonesia Best Of Award 2019* kali ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan kemudahan dalam setiap langkah dan upaya kita. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
“JOGJA BERSYUKUR”
DALAM RANGKA PERINGATAN 70 TAHUN
SERANGAN OEMOEM 1 MARET 1949**

Plaza Monumen SO I Maret, 04 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati,

Alhamdulillah, segala puja puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan tetesan pengetahuan dan sedikit penguasaan atas teknologi informasi, sehingga Majelis Ta'lim Darul Hasyimi Pengda Yogyakarta, dapat menyelenggarakan kegiatan “**Jogja Bersyukur**” dalam rangka Peringatan 70 Tahun Serangan Oemoem 1 Maret 1949.

Hadirin dan Saudara sekalian yang berbahagia,

Peringatan Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 2019, adalah peringatan ke-70 tahun Serangan Oemoem 1 Maret 1949 yang dikenal fenomenal, walau hanya mampu menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Merupakan salah satu dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang kita alami. Peristiwa lokal yang mendunia, karena mampu memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional. Merupakan momentum penting perjuangan bangsa kita untuk menegaskan kedaulatan yang hendak dirobahkan eksistensinya, dengan kembalinya kolonialis Belanda melalui serangkaian agresi.

Oleh karenanya perjuangan para pendahulu kita dalam Serangan Oemoem 1 Maret 1949 kala itu, spiritnya harus bisa kita teruskan dan kita terus berupaya memastikan agar bangsa kita tetap berdaulat di segala bidang. Dengan demikian, kita bisa berdaulat pula mewujudkan kemakmuran dan keadilan berdasarkan Pancasila bagi segenap bangsa Indonesia, serta mampu secara berwibawa berdiri secara dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia.

Prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono IX menciptakan sebuah kejutan, yaitu menggugah kembali semangat rakyat untuk meningkatkan kembali semangat juang mereka, serta memobilisir pasukan dan segera menyusun sektor-sektor pertahanan mengililingi Ibukota maupun di dalam kota, untuk kemudian melakukan serangan besar ke posisi Belanda yang menduduki Yogyakarta, harus menjadi pendorong dan spirit kita semua untuk terus berjuang.

Serangan itu berhasil, karena bulatnya tekad rakyat Indonesia untuk hidup merdeka, yang didorong oleh patriotisme yang tinggi dan nasionalisme yang kuat. Tetapi jika kita renungkan, Serangan Oemoem 1 Maret 1949, mengandung berbagai pelajaran yang berguna, sebagai bekal untuk meneruskan perjuangan guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Zaman telah berubah. Dewasa ini upaya-upaya perobohan eksistensi tegaknya kedaulatan negara Indonesia bisa kita saksikan telah terjadi. Kini kita telah mengalami penjajahan dalam bentuk lain. Kita menghadapi musuh-musuh dan tantangan yang berkembang sedemikian canggih dan nyaris sempurna, salah satunya yaitu *proxy war*.

Perang *proxy* yang telah mengalami metamorfosa dan menemukan cara baru. Kemajuan teknologi berbasis internet telah mendorong perang yang semula konvensional menjadi *proxy* dengan memberikan mandat kepada pihak ketiga baik negara tetangga, LSM, organisasi-organisasi oposisi, media dan lain sejenis, sebagai cara menghindari untuk terlibat langsung. Dengan kata lain, *proxy war* atau perang tanpa bentuk, tidak bisa dilihat siapa lawan dan siapa kawan, telah mengancam Indonesia.

Dalam kondisi seperti ini, kita sangat memerlukan patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme dan nasionalisme perlu terus kita pelihara, sebab pembangunan juga memerlukan patriotisme dan nasionalisme, memerlukan persatuan dan kesatuan, memerlukan rasa percaya diri. Oleh karena itu, peringatan Serangan Oemoem 1 Maret 1949 memiliki makna strategis untuk

kita serap spiritnya, kita serap semangat perjuangannya. Tidak cukup hanya dimaknai sebatas romantisisme kesejarahan, tetapi sebagai wujud apresiasi dan penghargaan terhadap generasi pejuang bangsa terdahulu. Penghargaan itu harus dilakukan dengan cara melanjutkan spirit dan cita-cita yang diperjuangkan, yaitu tegaknya kedaulatan bangsa untuk terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi segenap warganya, serta kewibawaan harga diri bangsa kita dalam percaturan antar bangsa.

Kesadaran kesejarahan tentang peristiwa ini, harus bisa diimplementasikan dan diteruskan generasi selanjutnya sebagai spirit dan gairah generasi kita hari ini untuk dapat memastikan kelangsungan eksistensi kedaulatan bangsa kita dalam semua lini kehidupan.

Rasa satu kesatuan yang dimiliki tiap elemen bangsa akan membentuk bangsa yang bersatu, mampu memperkuat rasa kesatuan, yang pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang bersatu pula dengan Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup dalam bingkai NKRI.

Hadirin dan saudara sekalian yang saya hormati,

Sekaranglah saatnya kita mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak sebatas tawar-menawar, tetapi dengan tawaran kehidupan budaya dan rasa kebangsaan yang lebih hangat. Senantiasa membangun persamaan dan kebersamaan untuk menuju adicita bangsa, bersatu dalam karya, beragam dalam kreatifitas, mengabdikan dan berbakti untuk bangsa dan negara..

Saya berharap, peringatan Serangan Oemoem 1 Maret, hendaknya dapat **dijadikan sebagai momentum untuk** menyadarkan masyarakat untuk melawan penjajahan dalam bentuk yang berbeda. Kita harus tetap mewaspadaikan dan mempersiapkan diri dengan baik terhadap kehadiran kembali penjajahan tersebut.

Indonesia dengan komposisi masyarakat yang beragam budayanya, harus bisa menjadi kekuatan dan potensi bagi pembangunan sosial dan ekonomi, ditopang oleh kekuatan modal sosial yang memadai, yang mampu menumbuhkan rasa aman dan nyaman di masyarakat, mewujudkan masyarakat yang ayom ayem, tata, titi, tentrem karta raharja. Bukan malah sebaliknya menjadi pemicu konflik.

Mudah-mudahan momentum ini dapat memotivasi semua untuk memulai dari Yogyakarta untuk Indonesia berdaulat, memotivasi kita semua untuk melangkah mewujudkan kondisi masyarakat yang damai sejahtera, saling menghormati. Menjadikan masyarakat yang hebat bukan karena bisa berbicara keras, bukan karena mampu menggertak, bukan karena mempunyai otot yang kuat, tetapi masyarakat yang mampu dan sanggup menghadirkan rasa damai.

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat memperingati Serangan Oemoem 1 Maret, semoga dapat dilaksanakan dengan baik, dalam upaya menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara mencintai dan mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila. Semoga peringatan ini dapat membangkitkan semangat kita semua, terutama kaum muda, untuk memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya bagi perjuangan pembangunan bangsa kita. Sehingga pada saat memasuki Tahun Generasi Emas 2045 nanti, kita telah siap melanjutkan perjuangan mempertahankan jerih payah para pahlawan kita yang telah membebaskan negara kita dari penjajah.

Nilai *heroisme* Serangan Oemoem 1 Maret 1949 harus dipertahankan dan ditanamkan ke dalam jiwa sanubari setiap elemen bangsa, baik pemuda, santri, agamawan, mahasiswa, pejabat, wakil rakyat, dan pengusaha, mengingat semua bagian dari bangsa dan Negara mempunyai kewajiban untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan menjaga agar Merah Putih tetap berkibar di seluruh persada bumi pertiwi. sebagai kota perjuangan, demi Indonesia yang semakin **maju**.

Semoga Tuhan YME melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Plaza Monumen SO 1 Maret, 04 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
KULIAH UMUM
BAGI 652 ORANG PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS DAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN
GOR Kridosono Yogyakarta, 2 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang terhormat, Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Tjahjo Kumolo;**
- **Yang saya hormati, Jajaran Pejabat dari Kemendagri RI;**
- **Para peserta Kuliah Umum yang saya banggakan,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saudara-saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa CPNS yang telah diangkat sebagai PNS adalah unsur utama SDM Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Demikian pula, sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itulah maka Kuliah Umum ini diberikan sebagai upaya guna memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi, agar PNS mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat dengan baik.

Sesuai dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi praktek-praktek KKN atau yang lebih populer dengan istilah "*Good Governance*". Dengan demikian maka yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan memberikan pelayanan prima.

Saudara-saudara sekalian,

Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang besar kepada peserta Kuliah Umum, nantinya agar mampu menjadi PNS yang visioner, kreatif, berkualitas, serta mampu menjadi pionir bagi kemaslahatan masyarakat. Mampu mensinergikan semangat pengabdian dengan peningkatan kemampuan kerja yang berakar dari ilmu, pengetahuan, serta wawasan yang saudara dapatkan dan kuasai dari pelaksanaan pelatihan ini, semua itu kita harapkan ke depan akan bermuara pada peningkatan prestasi kerja saudara di instansinya masing-masing.

Selain itu, sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat tentunya hal ini harus dibarengi pula dengan dedikasi tinggi dan totalitas kerja dari saudara-saudara semua melalui peningkatan kinerja. Tingkatkan kepekaan dalam mencermati setiap keadaan yang tengah kita hadapi pada waktu sekarang ini, serta mampu merubah setiap tantangan untuk dapat menjadi peluang yang lebih baik.

Kembangkanlah keterampilan manajemen, baik konseptual (*conceptual skill*), interaksi antara sesama rekan (*human relation skill*), dan kemampuan teknis (*technical skill*). Karena kompleksitas dalam mengelola pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara, mau tidak mau membutuhkan kemampuan manajemen yang baik agar terbentuk sikap kemandirian dalam bekerja, mampu bekerja sama dalam *teamwork*, dan mampu mengelola tugas dan tanggung jawab secara terencana dan berhasil.

Saudara-saudara sekalian,

Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan perenungan kita bersama serta dapat lebih memberikan kita motivasi dalam melaksanakan setiap tugas dan amanah yang sudah dipercayakan dipundak kita.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

GOR Kridosono Yogyakarta, 2 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
M E L E P A S
PESERTA PATRIOT RUN 2 DAN FUN WALK
“DARI YOGYA RI BERDAULAT”
Yogyakarta, 31 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa, Mayjen TNI (Purn) Lukman R. Boer;**
- **Para Peserta Patriot Run 2 dan Fun Walk yang berbahagia,**

Selamat Pagi !

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kita semua menyadari bahwa aktivitas olahraga yang rutin sangat baik untuk menciptakan tubuh, jiwa serta pikiran yang sehat. Oleh karena itu, olahraga menjadi bagian penting serta menjadi penentu kesehatan seseorang. Sehingga dengan tubuh, jiwa serta pikiran yang sehat, kita akan mampu menciptakan karya yang produktif dan bermanfaat untuk kebaikan bangsa.

Maka dengan kegiatan Patriot Run 2 dan Fun Walk dengan tema “Dari Yogya RI Berdaulat” ini merupakan usaha untuk menggali kembali semangat perjuangan pada Serangan Umum 1 Maret 1949 sekaligus meningkatkan kesehatan serta kebugaran kita semua, di tengah-tengah kesibukan serta aktifitas rutin sehari-hari, sehingga para peserta sekalian dituntut untuk tidak melupakan aktivitas berolahraga seperti olah raga lari dan jalan sehat ini sekaligus sembari bersilaturahmi.

Hadirin dan saudara-saudara sekalian,

Olahraga lari dan jalan sehat merupakan jenis olahraga yang paling digemari banyak orang, karena tentunya jenis olahraga ini termasuk jenis olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan. Dan tentunya jika rutin dan teratur melakukan olahraga ini ternyata banyak manfaatnya bagi kesehatan dan kebugaran tubuh kita.

Yang jelas tubuh kita akan tetap bugar dan bersemangat dalam melakukan berbagai rutinitas sepanjang hari. Juga sangat baik untuk kesehatan kulit dan menjadikan kulit kita tampak awet muda, dapat mendorong motorik pada otak kita sehingga daya tangkap otak kita dapat lebih cepat dibandingkan dengan orang yang jarang berolahraga. Sekaligus bermanfaat untuk menjaga kekuatan kaki dan persendian, serta mencegah tekanan darah tinggi.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Semoga setelah kita tahu dan menyadari begitu pentingnya olahraga bagi tubuh, maka kita menjadi lebih rajin lagi untuk berolahraga setiap hari secara rutin dan teratur.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
MENJAGA MODERASI BERAGAMA MENGOKOHKAN
BANGSA
Bangsal Kepatihan, 31 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Kami hormati:

- Para Narasumber;
- Segenap Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam;
- Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia;

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara Pidato Kebangsaan dengan tema “Menjaga Moderasi Beragama Mengokohkan Bangsa” dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu untuk terus menampilkan wajah Islam yang moderat, negara multi agama dan multi budaya yang tidak

memformalisasikan Islam sebagai ideologi negara tetapi juga bukan negara sekuler, serta menggunakan nilai-nilai budaya lokal dan agama-agama lainnya untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masyarakat internasional perlu memahami bahwa Islam di Indonesia tetap berbagi ruang dengan umat beragama lainnya, untuk hidup bersama menciptakan kerukunan kehidupan beragama dan saling mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Masing-masing agama dan budaya yang hidup di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia terus mengembangkan dan memperkuat dialog lintas agama dan budaya di kalangan kaum moderat, karena dipercaya dapat membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan damai terutama di tengah maraknya ancaman seperti terorisme dan radikalisme. Dialog lintas agama dan budaya adalah sarana efektif untuk pembangunan toleransi agama dan budaya karena dapat mengurangi prasangka diantara orang yang berbeda agama dan budaya membangun komunitas yang lebih terpadu.

Hadirin sekalian,

Belajar mengenai pluralisme, Yogyakarta layak menjadi model kota pluralisme di Indonesia bahkan di dunia. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang memiliki keragaman. Semua jenis etnis, agama, dan paham mulai dari yang paling kiri hingga yang paling kanan ada di Yogyakarta. Salah satu keanekaragaman penduduk Yogyakarta terlihat di kalangan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah.

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan kota budaya dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun untuk memilih hidup di Yogyakarta. Dengan penduduk hampir tiga setengah juta

jiwa, Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam.

Yogyakarta merupakan simbol koeksistensi dan toleransi hidup antar agama dan pemeluknya. Kota Yogyakarta terus mencipta banyak konstruksi, yang mewujud dalam struktur harmoni, antara yang modern dengan yang tradisional, antara yang etnis dan Indonesia, antara global dan lokal, bahkan antara Islam dan non-Islam.

Di kawasan Kotabaru, terdapat bangunan Masjid Syuhada, Gereja Kristen HKBP, dan Gereja Katolik yang saling berdekatan. Bahkan sejak masa silam sudah disimbolkan oleh keberadaan Candi Prambanan yang Hindu berdampingan Candi Sewu yang Budha, membayangkan suasana kehidupan beragama yang penuh toleransi. Karena itu, para pemuka lintas agama dunia menyatakan bahwa Yogyakarta dianggap layak menyandang atribut “City of Tolerance”.

Saudara-saudara sekalian,

Saat ini merawat pluralisme merupakan salah satu tantangan utama pada era global. Kemajemukan di dunia terancam oleh masih terus berlangsungnya diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, masyarakat Yogyakarta sejauh ini lebih mengedepankan pendekatan akademis daripada non-akademis ketika menghadapi persoalan yang terkait toleransi kehidupan yang majemuk.

Yogyakarta dapat menjaga pluralisme dengan baik diantaranya karena tiga hal. Pertama, peran Kraton sangat kuat dan masih eksis sebagai *center of culture* atau pusat budaya. Kedua, masyarakat Yogyakarta merupakan masyarakat terdidik yang lebih mudah memahami dengan baik dan tidak mudah terprovokasi dibanding daerah lain. Ketiga, komunikasi yang baik

antar warga dan para pemangku kepentingan yang ada di Yogyakarta.

Melalui pelaksanaan kegiatan kali ini, Saya berharap kita semua dapat menjadikan kegiatan ini sebagai wadah komunikasi dan menambah pengetahuan dalam upaya menghapuskan sikap *ignorance*, *prejudice* dan intoleransi serta mencegah dan mengatasi radikalisme, ekstrimisme serta terorisme. Selain itu, Saya berharap kemajemukan yang ada di Yogyakarta dapat menjadi contoh dalam membangun dan menjaga pluralisme di Indonesia bahkan di dunia.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Bangsals Kepatihan, 31 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
NAPAK TILAS SO 1 MARET FUNBIKE 2019
Yogyakarta, 17 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,
Selamat Pagi !!!

**Yang saya hormati, Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta, beserta Jajaran;
Ketua beserta Para Alumni Fakultas Ekonomi dan Fakultas Tambang UPN "Veteran" Yogyakarta;
Hadirin Tamu Undangan dan Para Peserta Fanbike yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama Pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik kegiatan Napak Tilas SO 1 Maret Fanbike 2019 ini. Diselenggarakan oleh keluarga besar Alumni Fakultas Ekonomi dan Fakultas Tambang UPN "Veteran" Yogyakarta bersama UPN "Veteran" Yogyakarta. Sebagai bentuk peringatan 70 tahun peristiwa Serangan Oemum 1 Maret 1949 di Yogyakarta serta menyongsong Dies Natalis ke-61 tahun UPN "Veteran" Yogyakarta.

Fanbike ini merupakan bentuk kegiatan nyata dan strategis bagi generasi muda di dalam mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dilancarkan oleh TNI dan rakyat di dalam menghadapi agresi militer belanda ke-2 di Yogyakarta.

Saudara-saudara sekalian,

Kegiatan Fanbike ini disamping sebagai sarana untuk berolahraga, sekaligus para peserta juga akan dapat mengingat kembali lintasan sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah melalui napak tilas Serangan Oemum (SO) 1 Maret.

Kegiatan ini juga sangat tepat, mengingat pada umumnya masyarakat Yogyakarta banyak yang mempunyai sepeda. Berangkat dari kesenangan atau hobi bersepeda, kita dapat berusaha menjadikan sepeda sebagai sarana untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.

Olah raga bersepeda membutuhkan oksigen yang lebih banyak dibandingkan mereka yang pasif duduk dalam mobil atau kendaraan umum. Bagi pengayuh sepeda, mereka akan menghirup dan menghembuskan lebih banyak udara dibandingkan mereka yang pasif dalam satuan waktu yang sama, sehingga partikel yang berbahaya tidak sempat mengendap di paru-paru dan salurannya.

Program bersepeda mempunyai dampak amat besar terhadap cara orang melihat pilihan yang mereka miliki untuk sarana olah raga, hobi serta transportasi. Namun demikian upaya untuk membiasakan masyarakat untuk bersepeda memang bukan hal yang mudah, harus dengan sikap yang cerdas dan arif serta waktu yang panjang, berkesinambungan terus menerus.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga **Napak Tilas SO 1 Maret Fanbike 2019**, dapat terlaksanan dengan baik dan lancar. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PADA PIDATO KEBANGSAAN
“MENJAGA MODERASI BERAGAMA MENGOKOHKAN
BANGSA”
Yogyakarta, 31 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *Insyallah* penuh berkah ini, Saya mengajak hadirin dan saudara sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puja puji dan syukur kehadiran *Allah SWT*, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Kita juga bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri rangkaian kegiatan Pidato Kebangsaan dengan tema “Menjaga Moderasi Beragama Mengokohkan Bangsa”, yang diselenggarakan Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Suluh Kebangsaan.

Hadirin dan Saudara sekalian yang berbahagia,

Belakangan ini ada kekhawatiran atas munculnya gangguan terhadap Islam Wasathiyah, yang ditandai oleh munculnya isu intoleran dan radikalisme, sehingga tantangan terhadap moderasi Islam semakin meningkat. Dimana perkembangan teknologi terus melambung tinggi, disisi lain patologi sosial juga terus meningkat setiap saat. Pertumbuhan teknologi telah merubah gaya hidup (*Life style*) masyarakat, mulai dari permasalahan terkecil seperti *Bullyng* hingga masalah terbesar seperti halnya radikalisme politik. Lebih dari itu, ancaman radikalisme politik dewasa ini semakin mengerikan dan nyata adanya, terlebih pasca-pilkada serta menjelang pilpres 2019, manuver demi manuver, *Cyber-war*, ujaran kebencian, perang tagar, hingga penyebaran fitnah, senantiasa menghujani dunia nyata maupun dunia maya (media sosial).

Patologi ini tak lain dan tak bukan adalah karena dekadensi moral yang telah mewabah didalam masyarakat ataupun oknum tertentu. Padahal jelas didalam Al-Qur'an yang tiada keraguan padanya, sudah semestinya dijadikan pedoman hidup seorang muslim dalam mengarungi samudera kehidupan yang serba kompleks dan beragam. Sehingga apa yang diajarkan didalam Al-Qur'an dapat menjadi acuan dan rujukan utama dalam bersosial dan bermasyarakat. Hal itu berbalik dengan istilah Api Islam yang mula pertama dilontarkan oleh Bung Karno, setelah mendalami Islam dalam masa-masa perjuangan, termasuk pemenjaraan dan pengasingan terhadap dirinya pada masa penjajahan.

Waktu itu Bung Karno mengatakan, kita hanya mempunyai abunya Islam, tidak bisa menyalakan apinya Islam. Bagi Bung Karno, Islam adalah agama yang mendorong kemajuan bagi umat manusia dan semua bangsa di dunia, tetapi sayangnya kita hanya

menggunakan abunya Islam seperti soal kerudung, jenggot, dan sebagainya.

Gagasan api Islam Bung Karno bersinergi dengan gerakan-gerakan Ormas Islam pada saat itu, seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam, Al-Irsyad dan lain-lain untuk memerdekakan Indonesia. Dialog dan perdebatan yang sportif diantara mereka menghasilkan lahirnya negara Indonesia yang merdeka dengan dasar ideologi negara Pancasila. Di negara Pancasila berintegrasi Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan yang menjadikan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, inklusif, dan toleran. Perkembangan berikutnya, melalui perdebatan yang sangat mendalam tentang Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, tasamuh, dan inklusif itu melahirkan konsepsi Islam Moderat (Islam Wasathiyah) bagi negara Indonesia. Oleh sebab itu jika kita ingin maju, termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, maka kita harus menyalakan api Islam, bukan menggunakan debu-debu Islam. Api Islam bisa menggelorakan semangat untuk merdeka, mensejajarkan bangsa Indonesia tegak dihadapan bangsa-bangsa lain, dan membangun toleransi yang berkeadaban.

Konteks hari ini, maka moderasi Islam diharapkan menjadi penengah untuk mengendalikan keadaan yang kondusif. Moderasi Islam datang sebagai nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, kerahmatan dan keseimbangan yang memiliki akar sejarah yang kuat mulai dari Rasulullah serta para sahabatnya. Moderasi adalah jalan pertengahan, dan ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, umat Islam disebut dengan Ummatan Washathan yang berarti ummat pertengahan. Ummat yang serasi dan seimbang, yang mampu memadukan antara dua kutub agama terdahulu.

Oleh sebab itulah menyongsong tahun politik 2019 ini, saya mengapresiasi dan menyambut baik Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Suluh Kebangsaan yang juga menyelenggarakan seminar Api Islam untuk menguatkan kembali paham ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan, karena memang Indonesia mempunyai kekayaan akan keberagaman budaya, agama, dan bahasa. Indonesia mempunyai Pancasila, ideologi yang terkandung spirit memberikan arah dan tujuan ke mana negara Indonesia bergerak.

Di Indonesia ada sebuah peradaban yang mempesona melalui gagasan negeri yang dibangun dari landasan tradisi dengan konsep negara modern. Hal itu mencerminkan komitmen bangsa kita untuk mempraktekkan toleransi dan kedamaian hidup satu sama lain, sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, yang dilahirkan menjadi bangsa beragam., sekaligus mengokohkan bangsa

Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati,

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengapresiasi dan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini, semoga kita semua bisa terdorong untuk kembali menghidupkan semangat awal dalam kehidupan praktis. Mampu menjaga moderasi agama dan mengokohkan bangsa, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah menyediakan cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara, yaitu terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, perikemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan berkeadilan. Nilai-nilai Ke-Islaman, Ke-Indonesiaan, dan Pancasila sebagai sarana pemersatu sekaligus mengokohkan bangsa dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Sekian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PADA SOSIALISASI PROSES PEMBENTUKAN KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL
Yogyakarta, 05 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati, Deputi Pencegahan KPK; serta,
Yang saya hormati, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi;
Hadirin dan Saudara sekalian peserta sosialisasi yang saya hormati
pula,**

Puja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, karunia dan perkenan-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan Sosialisasi Proses Pembentukan Katalog Elektronik Lokal bagi 34 Provinsi yang Menjadi Target Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020, dalam keadaan selamat, sehat dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sangat penting ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada para nara sumber dan peserta sosialisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Yogyakarta, kota yang melandaskan dirinya pada tiga pilar, yaitu pendidikan, budaya, dan pariwisata. Semoga dengan dukungan suasana yang kondusif, kegiatan ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua utamanya bagi pembangunan integritas berkelanjutan di negara kita.

Hadirin dan Saudara peserta workshop sekalian,

Masalah korupsi di negara kita seakan tidak henti-hentinya dilakukan oleh beberapa oknum pejabat negara dan pemerintah yang notabene

mempunyai pendidikan tinggi dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Disini semakin jelas terlihat bahwa integritas merupakan masalah moral yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap diri kita, agar terhindar dari bentuk-bentuk tindakan penyimpangan sosial yang merugikan negara.

Kita ketahui bersama, modus perkara korupsi terbanyak terjadi pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), karena sering dilakukan *mark-up* atau menaikkan anggaran. Setidaknya hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor PBJ. Dengan kata lain, sektor PBJ adalah titik rawan tindak pidana korupsi, di samping sektor atau bidang perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD), serta pelayanan perizinan.

Titik rawan penyimpangan di sektor PBJ selama ini bisa kita lihat bersama telah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan yaitu terjadi penggelembungan anggaran yang merugikan keuangan negara. Kerawanan penyimpangan dan korupsi juga terjadi pada tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri.

Hadirin dan Saudara peserta sosialisasi yang saya hormati,

Korupsi di sektor PBJ Pemerintah, akan berakibat pada rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan. Oleh karena itu korupsi di sektor ini harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya oleh KPK, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai *stakeholder* utama pencegah dan pemberantas korupsi, tetapi oleh semua pihak, baik di pemerintahan (kementerian/lembaga/Pemda), juga masyarakat sipil.

Dalam kaitan itu maka Katalog elektronik (e-Katalog) lokal/daerah yang hari ini proses pembuatannya disosialisasikan menjadi instrumen baru dalam menciptakan PBJ pemerintah yang terbuka dan efisien, sangat penting artinya. Karena e-Katalog lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang atau jasa dari berbagai penyedia, yang disusun dan dikelola, dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah. Sehingga melalui e-Katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah, dapat diakses oleh semua pihak, dan pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu juga mendorong terbentuknya harga pasar yang lebih kompetitif, dan lebih jauh lagi meminimalisir disparitas harga akibat biaya pengiriman, sekaligus memacu tumbuh kembang iklim usaha dan memperkuat basis pasar pengadaan di daerah secara berkesinambungan. Bahkan tercipta iklim yang kondusif untuk persaingan yang sehat, efektif dan efisien, mempercepat pelaksanaan proses pengadaan tanpa melupakan aturan-aturan dan tidak bertentangan dengan prinsip *good governance*. Artinya, e-Katalog merupakan solusi untuk segala macam kebutuhan PBJ yang cepat dan aman.

Dengan e-Katalog pula, kita bisa mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, mengingat korupsi tidak bisa ditangani dengan cara biasa, melainkan harus dengan cara yang istimewa dengan menciptakan dan menerapkan sistem yang efektif tetapi terbuka dan transparan.

Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita mendapat pencerahan maupun pengetahuan baru terkait proses pembentukan Katalog Elektronik Lokal, yang selanjutnya nanti dalam praktiknya bisa menghasilkan efisiensi belanja pemerintah, memperkecil anggaran yang keluar, pemerintah akan semakin hemat.

Sekian dan terima kasih perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PAMERAN JOGJA INTERNATIONAL FURNITURE AND CRAFT
FAIR INDONESIA (JIFFINA)
KE-4 TAHUN 2019
Yogyakarta JEC, 13 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Menteri Perindustrian RI, Bapak Airlangga Hartarto;**
- **Yang saya hormati, Ketua Forum JIFFINA Jawa-Bali, Bapak Dr. Drs. Timbul Raharjo, M.Hum;**
- **Yang saya hormati, Ketua Panitia JIFFINA 2019, Bapak Endro Wardoyo;**
- **Para Perwakilan Peserta Pameran JIFFINA 2019;**
- **Hadirin Tamu Undangan yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir dan berkumpul ditempat ini, guna menghadiri pembukaan Pameran *Jogja International Furniture And Craft Fair Indonesia* (JIFFINA) ke-4 tahun 2019, dalam kondisi sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya sampaikan apresiasi yang tinggi atas diselenggarakannya Pameran JIFFINA kali ini, serta selamat datang kepada Bapak Menteri Perindustrian RI dan seluruh perwakilan peserta pameran dari Jawa dan Bali. Semoga pameran kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat meningkatkan nilai transaksi dari produk yang dipamerkan, dan kedepan akan memberikan

kemajuan bagi para peserta didalam menghadapi ketatnya persaingan bebas di pasar global.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Kita semua menyadari bahwa investasi daerah dipahami sebagai salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah, dimana akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan, jika terdapat arus investasi yang signifikan. Pentingnya investasi ini sekiranya telah mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melalui promosi, investasi dan perdagangan.

Selain itu, didalam membangun ekonomi daerah, perlu adanya suatu identifikasi terhadap keunggulan potensi daerah, potensi pasar dan penentuan strategis terhadap pembangunan daerah itu sendiri, dengan pengembangan pasar melalui promosi ataupun publikasi, dapat berupa kegiatan pameran seperti yang diselenggarakan pada saat ini.

Dengan diadakannya Pameran *Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia* (JIFFINA) 2019, merupakan wadah promosi efektif dan efisien bagi produk-produk komoditi unggulan daerah khususnya industri mebel (*furniture*) dan kerajinan (*craft*) yang berorientasi ekspor dari perusahaan di Jawa dan Bali, sekaligus sebagai sarana membangun jaringan bisnis dan memperluas pangsa pasar dalam dan luar negeri.

Pameran ini, merupakan peluang sekaligus kesempatan baik didalam membangun kembali dan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam pengelolaan organisasi usaha, pengelolaan pemasaran, pengembangan bentuk-bentuk jejaring (*networking*) yang mungkin bisa dikembangkan dalam peningkatan usahanya.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dengan mengangkat tema “*The Innovation, Lifestyle for Sustainable Forest*” pada pameran ini, maka para pelaku usaha dapat mempertunjukkan, memperagakan dan memasarkan hasil produknya, agar lebih dikenal lagi pada masyarakat luas. Sehingga dengan pameran ini, maka produsen dan konsumen dapat langsung berinteraksi dan berkompetisi untuk memperoleh nilai jual yang layak. Demikian pula, para perajin dapat memperoleh ide-ide baru untuk memenuhi permintaan pasar. Guna mempertahankan dan mengembangkan pasar yaitu dengan menciptakan produk baru dengan sentuhan desain sesuai dengan trend yang berkembang dipasar internasional.

Dengan menciptakan seni kerajinan melalui desain baru dari orang-orang yang kreatif dan memiliki kreativitas dalam mencipta desain.

Karena kreativitas merupakan proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru, bahkan hubungan antara gagasan dan konsep yang telah ada. Hasil pemikiran kreatif itu umumnya memiliki keaslian dan kepantasan. Sebagai alternatif konsepsi sehari-hari dari kreatifitas merupakan tindakan untuk membuat sesuatu yang baru atau berdaya cipta . Daya cipta atas kemampuan untuk mencipta sesuatu itulah yang membuat sesuatu tak berguna menjadi berdaya guna, sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, bahkan yang belum ada menjadi ada. Dalam bidang seni kreativitas memegang peran yang sangat penting sebab kreativitas menciptakan seni menjadi tolok ukur sang perajin, seberapa jauh kreativitasnya dapat memberikan dampak terhadap dirinya maupun lingkungannya.

Sehingga kita harus bekerja lebih baik, lebih kreatif dan inovatif, selalu mengikuti perkembangan dan permintaan konsumen serta senantiasa mengikuti atau mempertimbangkan isu-isu perdagangan internasional, seperti produk yang ramah lingkungan dan produk yang peduli akan kesehatan. Di samping itu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu dengan memunculkan dan mendaftarkan *brand* atau merk untuk produk yang kita hasilkan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta JEC, 13 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PAWAI BUDAYA
DALAM RANGKA PERAYAAN HARI RAYA NYEPI TAHUN BARU
SAKA 1941 (2019 M)
Yogyakarta, 2 Maret 2019**

Om Swastiyastu

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahteraan bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Ketua Umum Panitia Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1941 (2019 M) DIY;**
- **Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DIY;**
- **Para Pejabat di Lingkungan Pemda DIY;**
- **Hadirin dan Seluruh Warga Masyarakat Yogyakarta yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini untuk menghadiri Pawai Budaya dalam rangka Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941 (2019 M). Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan semoga di Tahun Baru Saka 1941 ini, umat Hindu senantiasa diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Kita menyadari bahwa kegiatan Pawai Budaya dan Seni Ogoh-ogoh ini dalam rangka Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941 ini, ogoh-ogoh dapat mewakili roh jahat dan ditujukan untuk menyucikan lingkungan alami dari setiap polutan spiritual yang dipancarkan dari aktivitas makhluk hidup, termasuk manusia. Ogoh-ogoh yang berarti "mengguncang" dan mewakili kejahatan yang perlu dijauhkan dari manusia. Setelah diarak di

sekitar kota dan desa, ogoh-ogoh selanjutnya dibakar sebagai simbol pemurnian diri. Dengan membakar ogoh-ogoh, umat Hindu telah siap memperingati Nyepi dalam keadaan suci. Di hari kesunyian itu, umat hindu diharapkan untuk diam dan melakukan refleksi diri. Orang-orang tinggal di rumah dan tidak diizinkan untuk menggunakan lampu, menyalakan api, bekerja, bepergian atau menikmati hiburan.

Kegiatan ini sebagai bagian penting dari kegiatan keagamaan di kalangan umat Hindu dan sebagai ajang yang sarat dengan nilai spiritual dimana umat hindu akan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa serta mengamalkan nilai-nilai dharma dan estetika, meningkatkan keimanan serta rasa kemanusiaan demi terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang harmonis. Maka sangat diharapkan umat hindu senantiasa melakukan berbagai tindakan dan niatan positif yang baik sejalan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah ajaran agama Hindu.

Kegiatan keagamaan ini akan bermakna kalau kita juga dapat memetik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau kita bisa menghayati setiap peristiwa religius, di situ akan dapat dipetik mutiara-mutiara kehidupan yang akan menjadi inspirasi dan sumber motivasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Semakin kita menghayati dan meresapi mutiara-mutiara kehidupan yang terkandung dalam setiap peristiwa religius, niscaya semakin meningkat pula wawasan kita dalam mengarungi hidup, kehidupan dan penghidupan ini, baik sebagai perseorangan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, atas perhatiannya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Om Santi Santi Santi Om,

Yogyakarta, 2 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PELANTIKAN
PENGURUS ASOSIASI RUMAH SAKIT SWASTA
INDONESIA (ARSSI) CABANG DIY
PERIODE 2019-2022
Yogyakarta, 30 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Ketua ARSSI Pusat;**
- **Yang saya hormati, Ketua ARSSI Cabang DIY; beserta seluruh Pengurus yang hari ini dilantik,**
- **Hadirin Tamu Undangan dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin sekalian,

Kita semua menyadari bahwa gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan

dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa layanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan standart dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Dibutuhkan adanya paradigma baru yang ditandai dengan pengelolaan suatu organisasi dengan menerapkan pola manajemen kualitas mutu dan pelayanan yang handal dalam menghadapi persaingan yang mengglobal, tak terkecuali pada sektor kesehatan. Kepuasan pasien menjadi tolok ukur tingkat kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, kepuasan pasien merupakan satu elemen yang penting dalam mengevaluasi kualitas layanan dengan mengukur sejauh mana respon pasien setelah menerima jasa. Perbaikan kualitas jasa pelayanan kesehatan dapat dimulai dengan mengevaluasi setiap unsur-unsur yang berperan dalam membentuk kepuasan pasien. Sistem kepedulian kesehatan dapat diperbaiki melalui jalur klinis, layanan, termasuk perspektif pasien seperti seberapa baik jasa pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Hadirin sekalian,

Berkaitan dengan hal tersebut maka mutu pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit harus terus ditingkatkan seiring

dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan diharapkan senantiasa dapat mengembangkan diri dalam menjawab kebutuhan masyarakat dengan jaminan mutu terhadap pelayanannya dan tuntutan untuk memberikan pelayanan secara prima.

Disamping itu, dalam era global saat ini tuntutan standarisasi mutu pelayanan kesehatan tidak dapat dielakkan lagi. Maka semua harus diarahkan kepada kesiapan seluruh profesi kesehatan dalam menyongsong era pasar bebas tersebut. Dalam arti harus mampu untuk bersaing dengan profesi kesehatan dari negara-negara yang lebih maju, dengan berperan serta aktif, terarah dan terpadu bagi pembangunan nasional.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Rumah Sakit yang terhimpun didalam Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang DIY yang selama ini, dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat luas telah dilaksanakan secara baik, optimal dan maksimal. Sekaligus ucapan “Selamat” atas dilantikannya Kepengurusan ARSSI periode 2019 – 2022, semoga dapat terus maju dan berkembang didalam meningkatkan standar mutu kualitas pelayanannya.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PELETAKAN BATU PERTAMA PELAKSANAAN PILOT PROJECT
PROGRAM INDONESIA TERANG LEMBAGA PENGEMBANGAN
CSR INDONESIA (LPCI)
Yogyakarta, 8 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati, MENKOPOLHUKAM RI, atau yang mewakili;
Yang saya hormati, Bupati Sleman;
Yang saya hormati, Ketua Umum LPCI;
Yang saya hormati, Perwakilan Asosiasi;
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kita bersama-sama menyadari bahwa orientasi dari sebuah usaha adalah untuk mencari keuntungan (*profit-oriented*). Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul adanya etika bisnis, orang mulai menyadari adanya keterkaitan antara nilai-nilai spiritualitas dengan keberlanjutan dan perkembangan sebuah usaha. Dalam konteks spiritual bisnis, bisnis bukan hanya semata-mata persoalan memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Tetapi bagaimana bisnis yang dijalankan bisa memberikan keuntungan dan keberkahan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Sehingga selanjutnya pada prakteknya sebuah usaha melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh partisipan dan lingkungan tempat perusahaan berada. Dalam konteks ini, bisnis bukan hanya semata-

mata persoalan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi bagaimana bisnis yang dijalankan bisa mendatangkan keuntungan serta keberlanjutan usaha perusahaan yang didapatkan dan dicapai dengan cara lebih manusiawi, dan melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh stakeholder. Sehingga perusahaan yang memperhatikan etika ini tetap akan langgeng dan berkembang.

Orientasi dan implementasi dari etika bisnis yang berkembang sekarang ini, pada umumnya telah diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Yaitu sebuah bentuk kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Terkait dengan hal tersebut maka atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik kegiatan pelaksanaan pilot project program Indonesia terang ini. Dengan harapan dapat meningkatkan sinergi antara Pelaku Usaha, Pemerintah dan masyarakat, yang diwujudkan dengan pengembangan CSR bidang elektrifikasi dan infrastruktur sipil, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar sasaran penerima manfaat benar-benar tepat, sekaligus dapat membantu program penanganan berbagai permasalahan sosial, para pengusaha juga diharapkan menyalurkan CSR secara melembaga misalnya melalui Lembaga Pengembangan CSR Indonesia ini. Demikian juga khususnya kepada para pengelola dimohon dapat menjadi pelopor untuk mengarahkan kegiatan CSR-nya melalui LPCI. Dan dalam hal ini, dunia usaha harus dapat mencontoh perusahaan-perusahaan yang sudah terlebih dahulu melaksanakan program CSR, seperti misalnya pada pelaksanaan pilot project Indonesia Terang ini serta bidang lainnya seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pendampingan kepada para pelaku usah mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta para petani dalam meningkatkan kualitas produksi, sekaligus menjamin kelancaran distribusi.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
P E M B U K A A N
PAMERAN DAN SEMINAR INDONESIA PROCUREMENT
FORUM DAN EXPO IKATAN AHLI PENGADAAN
INDONESIA (IPFE IAPI) 2019
Jogja Expo Center, 19 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati, Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan
Indonesia (IAPI);**

Para Peserta Pameran dan Seminar, serta;

Hadirin Tamu Undangan yang berbahagia,

Puja puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat *Allah SWT*, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam keadaan sehat wal-afiat pada acara Pameran dan Seminar Indonesia Procurement Forum dan Expo Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IPFE IAPI) 2019, di Jogja Expo Center, Yogyakarta.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Pertama-tama atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IPPE IAPI) atas penyelenggaraan kegiatan Pameran dan Seminar Indonesia Procurement Forum dan Expo (IPFE), yang didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam skala besar, momentum kegiatan yang dilaksanakan secara rutin ini, selain dapat memperkuat sinergitas bentuk dukungan IAPI kepada pemerintah dalam rangka mensosialisasikan produk atau jasa kepada *stakeholder* atau pengambil keputusan. Juga sangat bermanfaat jika kita semua mampu menangkap makna, peluang dan hikmah dari kegiatan ini dalam membangun komunikasi antar *stakeholder* pengadaan, sekaligus mengenalkan usaha nasional dan produk dalam negeri kepada para pemegang keputusan dalam menentukan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMD.

Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan akan semakin mempermudah bertemunya antar penyedia dengan pelaku pengadaan barang/jasa. Harapannya ada peningkatan kompetensi, sehingga para pelaku pengadaan menjadi satu koridor yang sama dalam memahami petunjuk dan pedoman yang berlaku. Artinya, ada kesepahaman yang sama antar pelaku pengadaan, kelompok kerja pemilihan, pejabat pembuat komitmen dan juga dengan penyedia.

Dengan tema '*Optimizing Procurement in The Digital Economy Era*' (Mengoptimalkan Pengadaan di Era Ekonomi Digital), kiranya kegiatan ini lebih jauh lagi dapat memberikan edukasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat luas.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Mengingat seminar akan membahas terkait pengadaan produk dan jasa, serta dalam IPFE juga dihadirkan pameran produk barang dan jasa oleh penyedia e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka harapan selanjutnya mudah-mudahan kegiatan yang digelar ini mampu mendatangkan timbal balik di bidang pengadaan. Sehingga percepatan pertumbuhan usaha nasional dan penggunaan produk dalam negeri bisa dicapai. Untuk itu sekali lagi saya menyambut baik penyelenggaraan Pameran dan Seminar Indonesia Procurement Forum dan Expo yang digelar di selama dua hari ke depan ini.

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat dan sukses Pameran dan Seminar Indonesia *Procurement Forum dan Expo*. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya menambah pengetahuan kita.

Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucap *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, **Pameran dan Seminar Indonesia Procurement Forum dan Expo Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IPFE IAPI) 2019**, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.

Sekian, terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sambutan

**PEMBUKAAN KONGRES IV IKATAN AHLI TEKSTIL
SELURUH INDONESIA (IKATSI)**

Yogyakarta, 8 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang terhormat, Menteri Perindustrian RI, Bapak Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A, M.M.T;**
- **Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;**
- **Yang saya hormati, Ketua Umum IKATSI;**
- **Yang saya hormati, Para Narasumber;**
- **Para Peserta Kongres, Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas diselenggarakannya Kongres IV Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) di Yogyakarta. Pertemuan ini merupakan sesuatu yang sangat strategis, karena dapat mempersatukan ahli-ahli tekstil se-Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan industri tekstil kedepan dengan lebih baik, mempersiapkan SDM yang memadai untuk kebutuhan perkembangan industri tekstil nasional di era global.

Hingga kini industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tetap menjadi andalan industri manufaktur dan penggerak ekonomi nasional. Hal ini dengan melihat tingginya kontribusi industri tersebut terhadap devisa ekspor dan penyerapan tenaga kerja serta pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri. Sehingga pasar yang sedemikian ketatnya juga merupakan momentum terhadap persaingan dibidang jasa, untuk itu dibutuhkan tenaga kerja ahli yang memadai dan andal. Melalui tenaga kerja yang kompeten ini diharapkan akan mampu membuat industri bisa bertahan serta kompetitif.

Industri TPT harus terus memiliki peranan yang strategis dalam proses industrialisasi. Hal ini penting karena, produk yang dihasilkan mulai dari bahan baku (serat) sampai dengan barang konsumsi atau pakaian jadi dan barang jadi, punya keterkaitan erat dengan industri maupun sektor ekonomi lainnya. Sehingga perlu menjaga dan meningkatkan pencapaian produk tersebut dengan penguatan daya saing agar industri TPT kian berkembang baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Olah karena ini tenaga ahli tekstil harus menjadi penggerak utama dalam mengembangkan industri TPT

nasional. Dan pertemuan ini sekiranya dapat menjadi media diskusi bersama serta saling tukar menukar pengalaman antar anggota IKATSI. Sehingga secara sinergis dapat memecahkan beberapa permasalahan SDM tekstil nasional, seperti keterbatasan kuantitas, persaingan dengan tenaga kerja asing maupun minimnya jejaring antara tenaga ahli dan industri.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan. “*Selamat Berkongres*” semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan rekomendasi dalam upaya bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan industri tekstil nasional.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGGU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sambutan

**PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI, BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Sewon Bantul, 19 Maret 2019**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;**
- **Yang saya hormati, Ketua Kejaksaan Tinggi DIY;**
- **Yang saya hormati, Kepala Kepolisian Daerah DIY;**
- **Yang saya hormati, Komandan Korem 072/Pamungkas;**
- **Yang saya hormati, Komandan Lanud Adisucipto;**
- **Yang saya hormati, Komandan Lanal Yogyakarta;**
- **Yang saya hormati, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY;**
- **Yang saya hormati, Kepala Perwakilan Ombudsman DIY;**

- **Yang saya hormati, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;**
- **Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara Penganjangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam kondisi sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di negara kita adalah meningkatnya kasus korupsi dari waktu ke waktu. Kondisi ini sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah di berbagai lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh di bidang pelayanan publik, biaya ekstra merupakan gambaran sehari-hari yang masih terlihat pada sebagian kantor-kantor pelayanan masyarakat. Serta kasus korupsi yang telah ditayangkan oleh media masa dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar. Disini masyarakat dapat melihat dengan kasat mata dan merasakan praktek korupsi yang semakin marak dan meluas. Korupsi juga banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan dan

pembelanjaan keuangan negara yang kurang transparan dan akuntabel, terutama pada sektor-sektor yang rawan korupsi.

Terlepas dari adanya ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas terjadinya kasus korupsi. Karena permasalahan ini juga berhubungan erat dengan sikap, perilaku, komitmen serta struktur dan sistem politik.

Korupsi selain terkait dengan aturan normatif yang lemah, sikap dan perilaku juga disebabkan karena lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari sistem rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada regenerasinya. Dan juga sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggungjawab untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada generasi muda terdidik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya.

Hadirin dan Saudara-saudara yang saya hormati,

Untuk itulah maka pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun pemerintahan di daerah, semua harus berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut merupakan cerminan seutuhnya dari kehendak masyarakat luas agar pemerintahan di negara kita melakukan tindakan-tindakan konkrit terhadap perilaku dan tindak koruptif di segala tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Komitmen tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan kokoh, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Komitmen ini juga memerlukan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta semua elemen masyarakat terkait lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami atas nama Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, diawali dengan penandatanganan Dokumen Piagam dan Pakta Integritas oleh pimpinan dan seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta dipublikasikan secara luas, dengan maksud agar semua pihak dapat memantau, mengawal, dan mengawasi, serta berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah ditetapkan, dengan harapan terwujudnya Pemerintah Daerah yang sungguh-sungguh berintegritas dan bebas dari korupsi. Momentum tersebut merupakan langkah awal dalam pemberantasan korupsi yang perlu diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi bidang. Dengan diprioritaskan untuk mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan

pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar.

Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, sumber daya manusia, politik, teknologi informasi dan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip "*rule of law*," memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dari tindakan korupsi dan terus melayani.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sewon Bantul, 19 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN DIY
Yogyakarta, 22 Maret 2019**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian
Sangah LKPP;**

Yang saya hormati, Para Narasumber;

Hadirin dan Para Peserta Sosialisasi yang berbahagia,

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini pada acara Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Lingkungan DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita bersama-sama menyadari bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mereformasi penyelenggaraan

pelayanan publik. Tantangan ke depan adalah bagaimana membangun ekosistem pengadaan yang lebih luas, transparan dan akuntabel, tentunya dengan melibatkan semua stakeholders dalam ekosistem pengadaan untuk berperan aktif dan menyelaraskan visi menuju sinergi untuk negeri, yang mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Persoalan dan tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah diketahui terakumulasi pada hampir tiap pentahapan, dari perencanaan hingga pembayaran, penyerahan dan pemeliharaan barang/jasa. Masalah pengadaan seringkali berevolusi dari kekedaran masalah administrasi, bermetamorfosis menjadi masalah hukum, dapat pidana atau perdata.

Untuk itu, pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, pihak pengguna maupun penyedia harus berpedoman pada filosofi pengadaan, tunduk pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, dan metode, serta prosedur pengadaan yang baik (*sound practices*). Sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Karena pemerintah selaku pengguna barang/jasa membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang berlaku.

Hadirin yang saya hormati,

Terkait dengan hal tersebut maka atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan pertemuan ini, dengan harapan peserta akan memahami pembahasan permasalahan hukum dan potensi permasalahan yang akan terjadi untuk mencegah tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan DIY.

Upaya pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa sebenarnya terus kita lakukan, sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemda DIY juga telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Serta mengembangkan penilaian pelayanan publik melalui *Citra Pelayanan Prima*. Penilaian ini menjadi stimulus bagi unit-unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan, utamanya adalah hal visi/misi pelayanan, sistem dan prosedur pelayanan, sumber daya manusia dan sarana-prasarana pelayanan.

Maka marilah secara bersama-sama kita bahu-membahu, semua pelaku dan pelaksana pengadaan barang/jasa membulatkan tekad dalam rangka menciptakan pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan tata nilai pengadaan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT, kegiatan **Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Lingkungan DIY**, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN BENCHMARKING PESERTA
DIKLAT PIM TINGKAT IV ANGKATAN I
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 KE
DIY
Yogyakarta, 18 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati, Para Widyaiswara Pembimbing dan Pendamping
Diklat Kapemimpinan Tk. IV Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
Para Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV, Hadirin serta Saudara-
saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul ditempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pertama-tama atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan "*Selamat datang dan terimakasih*" atas kehadiran Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian untuk berkunjung ke Yogyakarta. Semoga rangkaian kunjungan kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha membantu dengan seoptimal mungkin.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dalam penerimaan kunjungan kali ini, terlebih dahulu akan saya jelaskan sekelumit gambaran tentang Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering disebut DIY, yaitu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang wilayahnya tidak terlalu luas, hanya 3.185,80 kilometer² atau 0,17% dari luas Indonesia. Dengan luas wilayah yang sangat terbatas ini otomatis sumber daya alam yang ada juga sangat terbatas pula. Namun demikian DIY

memiliki predikat yang melekat pada daerah yaitu sebagai *Daerah Tujuan Wisata, Kota Budaya dan Kota Pendidikan* terkemuka, yang senantiasa kita upayakan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan materi kunjungan kali ini maka saya awali bahwa Pemerintah Daerah DIY memegang teguh dasar filosofi dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan *nilai budaya daerah* yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hakekat budaya adalah hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (*Intern*) maupun ke luar (*Extern*). Secara filosofis, budaya Jawa khususnya Budaya DIY dapat digunakan sebagai sarana untuk *Hamemayu Hayuning Bawana*. Ini berarti bahwa Budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ayom ayem tata, titi, tentrem karta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Dengan dasar filosofi tersebut maka kondisi yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan didalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan kondisi ini maka ditetapkan langkah untuk menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada masyarakat dan stakeholders untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat dan stakeholders melalui regulasi, fasilitasi dan pelayanan (*public services*) agar dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya sehingga dapat memberdayakan potensi daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Adapun lokus benchmarking pada Dinas Pendidikan Olah Raga serta RS. Paru Respira, dapat saya sampaikan bahwa dua institusi tersebut masuk di kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY ini merupakan salah satu urusan keistimewaan yang diatur dalam Perdas.

Hal ini untuk mengakomodir ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga. Sedangkan Rumah Sakit Paru Respira merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Adapun Rumah Sakit Daerah ini terdiri dari: Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Rumah Sakit Paru Respira sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya mengenai hal-hal teknis, terperinci dan lebih jelas lagi, maka Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian dapat membahasnya pada sesi diskusi selanjutnya dengan SOPD/instansi terkait dan kunjungan lapangan. Selamat menikmati kota Yogyakarta.

Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN BENCHMARKING PESERTA
DIKLAT PIM TINGKAT IV ANGGATAN I
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 KE
DIY
Yogyakarta, 18 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati, Para Widyaiswara Pembimbing dan Pendamping
Diklat Kapemimpinan Tk. IV Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
Para Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV, Hadirin serta Saudara-
saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul ditempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pertama-tama atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan "*Selamat datang dan terimakasih*" atas kehadiran Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian untuk berkunjung ke Yogyakarta. Semoga rangkaian kunjungan kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha membantu dengan seoptimal mungkin.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dalam penerimaan kunjungan kali ini, terlebih dahulu akan saya jelaskan sekelumit gambaran tentang Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering disebut DIY, yaitu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang wilayahnya tidak terlalu luas, hanya 3.185,80 kilometer² atau 0,17% dari luas Indonesia. Dengan luas wilayah yang sangat terbatas ini otomatis sumber daya alam yang ada juga sangat terbatas pula. Namun demikian DIY

memiliki predikat yang melekat pada daerah yaitu sebagai *Daerah Tujuan Wisata, Kota Budaya dan Kota Pendidikan* terkemuka, yang senantiasa kita upayakan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan materi kunjungan kali ini maka saya awali bahwa Pemerintah Daerah DIY memegang teguh dasar filosofi dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan *nilai budaya daerah* yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hakekat budaya adalah hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (*Intern*) maupun ke luar (*Extern*). Secara filosofis, budaya Jawa khususnya Budaya DIY dapat digunakan sebagai sarana untuk *Hamemayu Hayuning Bawana*. Ini berarti bahwa Budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ayom ayem tata, titi, tentrem karta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Dengan dasar filosofi tersebut maka kondisi yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan didalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan kondisi ini maka ditetapkan langkah untuk menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada masyarakat dan stakeholders untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat dan stakeholders melalui regulasi, fasilitasi dan pelayanan (*public services*) agar dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya sehingga dapat memberdayakan potensi daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Adapun lokus benchmarking pada Dinas Pendidikan Olah Raga serta RS. Paru Respira, dapat saya sampaikan bahwa dua institusi tersebut masuk di kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY ini merupakan salah satu urusan keistimewaan yang diatur dalam Perdas.

Hal ini untuk mengakomodir ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga. Sedangkan Rumah Sakit Paru Respira merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Adapun Rumah Sakit Daerah ini terdiri dari: Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Rumah Sakit Paru Respira sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya mengenai hal-hal teknis, terperinci dan lebih jelas lagi, maka Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian dapat membahasnya pada sesi diskusi selanjutnya dengan SOPD/instansi terkait dan kunjungan lapangan. Selamat menikmati kota Yogyakarta.

Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH KE DIY
Yogyakarta, 11 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah; beserta rombongan,**
- **Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi dalam rangka Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah ke DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebelumnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, kami mengucapkan *selamat datang* dan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian untuk berkunjung ke Yogyakarta. Semoga kunjungan kerja ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Selanjutnya terkait dengan materi kunjungan kali ini terkait pembahasan Raperda Pencabutan Perda, dapat saya kemukakan bahwa beberapa saat lalu Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengumumkan [pembatalan sekitar 3.143 Peraturan Daerah \(Perda\)](#). Perda bermasalah yang telah dibatalkan itu umumnya berkaitan dengan perizinan, investasi, kemudahan berusaha, intoleransi, dan

hal-hal yang dianggap meresahkan warga. Dengan demikian Gubernur, Bupati atau Kepala Daerah akan membuat peraturan yang sama dengan otomatis Perda itu akan digugurkan dan Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tentang mekanisme pencabutan Perda, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016. Dalam Instruksi Mendagri itu gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mencabut/mengubah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

Sedangkan pada Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah (Pemda), baik itu UU No.32 Tahun 2004 maupun penggantinya yaitu [UU No.23 Tahun 2014](#) (UU Pemda) memberi kewenangan Pemerintah mengawasi Perda, baik ketika masih bentuk rancangan maupun sesudah disahkan. Di dalam Pasal 251 UU Pemda memberi kewenangan pengawasan kepada Menteri dan Gubernur sampai dengan kewenangan pembatalan melalui instrumen berupa Keputusan Menteri dan Keputusan Gubernur. Menteri berwenang membatalkan Perda provinsi, sedangkan Gubernur berwenang membatalkan Perda Kabupaten/Kota.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Apabila gubernur tidak membatalkan Perda maka Menteri yang akan membatalkan Perda tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 251 ayat (3) UU Pemda. Keputusan pembatalan ini harus ditindaklanjuti dengan pemberhentian pelaksanaan Perda dan pencabutan Perda yang dibatalkan. Sanksi administratif dikenakan kepada Kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama tiga bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 252 ayat (3). Khusus untuk Perda Retribusi dan Pajak Daerah, apabila Pemerintah Daerah masih memberlakukan Perda yang dibatalkan maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil. Hal ini seperti diatur Pasal 252 ayat (2) UU Pemda.

Sedangkan Pemda diberi hak berdasarkan UU Pemda untuk mengajukan keberatan apabila tidak menerima keputusan pembatalan Perda. Ini sesuai Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8). Gubernur dapat mengajukan

keberatan atas pembatalan Perda provinsi kepada Presiden. Sedangkan, Bupati/Walikota mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri. Dan selama pengajuan keberatan, sanksi yang diatur dalam Pasal 252 ayat (3) tidak diberlakukan.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas maka kami menyambut baik kunjungan Bapak/Ibu sekalian dalam rangka study banding terkait pembahasan Raperda Pencabutan Perda kali ini, sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah serta Ketentuan Undang-Undang yang telah berlaku.

Demikian sedikit gambaran yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini. Selanjutnya mengenai penjelasan lebih dalam secara teknis dan terperinci, maka dapat di bahas pada diskusi selanjutnya dengan SOPD terkait. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BESERTA CAMAT SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
Yogyakarta, 22 Maret 2019**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, beserta seluruh rombongan;
Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi dalam rangka Kunjungan Kerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Camat Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan "*selamat datang*" dan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian untuk berkunjung ke DIY. Semoga kunjungan kerja ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Hadirin yang saya hormati,

Terkait dengan kunjungan ini maka dapat saya sampaikan bahwa pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan serta keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Amanat ini merupakan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada didaerahnya melalui kerjasama dengan daerah lain yang terkait.

Kerja sama dirintis disamping sebagai wujud dari *political will* Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah saat ini, juga untuk mengembangkan pemerintahan yang lebih maju dan akuntabel. Tuntutan jaringan kerjasama ini penting dan mutlak untuk dilakukan, karena tidak ada satu daerahpun yang mampu mengatasi sendiri masalahnya dalam memenuhi kehidupan masyarakatnya untuk dapat berkembang secara dinamis dan kompleks. Sehingga disinilah letak pentingnya kerjasama yang komprehensif, sinergis dalam mengembangkan potensi yang dimiliki pihak terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Untuk itulah saya menyambut baik kunjungan ini, semua ini selain sebagai media silaturahmi antar pejabat di kedua daerah, juga sebagai forum untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dengan penandatanganan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini juga kita perkenalkan sedikit gambaran tentang Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering disebut DIY, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang wilayahnya tidak terlalu luas, hanya 3.185,80 kilometer² atau 0,17% dari luas Indonesia. Dengan luas wilayah yang sangat terbatas ini otomatis sumber daya alam yang ada juga sangat terbatas. Namun demikian Yogyakarta telah memiliki predikat yang melekat pada daerah yaitu sebagai *Daerah Tujuan Wisata, Kota Budaya dan Kota Pendidikan*, yang senantiasa kita upayakan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebutan Yogyakarta sebagai kota **pariwisata** menggambarkan potensi provinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata desa bahkan, yang terbaru wisata malam dan kuliner.

Sebutan kota **kebudayaan** untuk kota Yogyakarta berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram.

Predikat sebagai kota **pendidikan/pelajar** berkaitan dengan sejarah dan peran kota Yogyakarta dalam dunia

pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di Yogyakarta, Terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dibidang pemerintahan, Pemerintah Daerah DIY memegang teguh dasar filosofi dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan *nilai budaya daerah* yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hakekat budaya adalah hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (*Intern*) maupun ke luar (*Extern*). Secara filosofis, budaya Jawa khususnya Budaya DIY dapat digunakan sebagai sarana untuk *Hamemayu Hayuning Bawana*. Ini berarti bahwa Budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ayom ayem tata, titi, tentrem karta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Dengan dasar filosofi tersebut maka kondisi yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan didalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan

kondisi ini maka ditetapkan langkah untuk menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Daerah juga bersifat *Katalistik* artinya yaitu bahwa dalam peran barunya Pemerintah DIY akan lebih diarahkan sebagai pengatur dan pengendali dari pada sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan layanan. Hal ini didasarkan kepada pengalaman bahwa jika urusan-urusan yang dapat diselenggarakan sendiri oleh masyarakat, namun tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka akan menimbulkan ketergantungan kepada Pemerintah Daerah, sehingga kreativitas dan semangat inovasi masyarakat maupun individu anggota masyarakat menjadi lemah.

Dengan peranan baru ini Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada masyarakat dan stakeholders untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat dan stakeholders melalui regulasi, fasilitasi dan pelayanan (*public services*) agar dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya sehingga dapat memberdayakan potensi daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin sekalian,

Dalam kerangka penciptaan *good governance*, kondisi ideal yang dilaksanakan di DIY yaitu semua kegiatan organisasi pemerintahan telah dilaksanakan secara terarah dan terukur, termasuk kaitannya dengan kegiatan pembinaan serta pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut maka belum lama ini Pemerintah Daerah DIY telah berhasil memperoleh nilai AA (terbaik nasional) dalam penilaian Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2018 dari Kementerian PAN dan RB RI.

Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini. Selanjutnya mengenai penjelasan lebih dalam secara teknis dan terperinci tentang materi kunjungan ini, maka Bapak/Ibu dapat membahasnya pada diskusi selanjutnya dengan OPD terkait. Dengan harapan kunjungan kerja ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta membawa hasil sesuai dengan yang kita harapkan, Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI II DPRD PROVINSI JAWA BARAT BERSAMA DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT
Yogyakarta, 3 Maret 2019**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat; beserta rombongan,**
- **Hadirin serta Saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi dalam rangka penerimaan Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat beserta rombongan ke DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebelumnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan "*Selamat datang dan terimakasih*" atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian untuk berkunjung ke Yogyakarta. Semoga kunjungan kerja ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi kita semua.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Sehubungan dengan materi kunjungan kerja ini terkait pada sektor kehutanan dan perkebunan, maka dapat saya sampaikan bahwa ruang lingkup pembangunan kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, sumber daya hutan, produksi, pengolahan dan pemasaran,

peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan kehutanan, pengembangan kelembagaan, optimalisasi dan pemanfaatan fungsi hutan, peningkatan konservasi sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekitar hutan, kelestarian hutan dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kehutanan ini diselenggarakan berdasarkan pada mandat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pengurusan sumber daya alam sebagai satu kesatuan ekosistem. Dengan tiga dimensi utama penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan yaitu *Pertama* Keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional, *Kedua* keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi, *Ketiga* tata kelola sumber daya hutan baik ekonomi, ekologi maupun sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh.

Hadirin sekalian,

Sedangkan pada sektor perkebunan yaitu bahwa tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kita menyadari juga bahwa lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan,

penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan adanya peran serta masyarakat.

Usaha tani komoditas tanaman perkebunan di DIY seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat petani dalam bentuk perkebunan rakyat, sehingga peningkatan maupun penurunan luas areal komoditas tanaman perkebunan terjadi sangat fluktuatif menyesuaikan situasi kondisi pasar dan bergantung pada keputusan petani dalam memilih komoditas tanaman yang diusahakan, utamanya tanaman semusim.

Pengembangan perkebunan DIY difokuskan pada 5 (lima) komoditas unggulan yaitu kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu. Sedangkan komoditas non unggulan namun banyak berkontribusi sebagai penyumbang produksi perkebunan antara lain: mendong, tembakau rakyat, nilam, serta cengkeh. Kawasan sentra produksi komoditas perkebunan kelapa, kopi, kakao dan nilam berada di wilayah Kabupaten Kulonprogo, untuk komoditas perkebunan jambu mete, kelapa dan kakao berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas perkebunan khususnya tanaman semusim seperti tembakau, mendong dan tebu banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Bapak Ibu sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk penjelasan lebih rinci dan teknis serta mendalam dapat di bahas pada diskusi selanjutnya dengan SOPD terkait. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
KOMITE III DPD RI KE DIY
Yogyakarta, 20 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Ketua Komite III DPD RI; beserta rombongan,**
- **Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi dalam rangka Kunjungan Kerja Komite III DPD RI ke DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebelumnya atas nama Pemerintah Daerah DIY, Saya mengucapkan “*selamat datang dan terimakasih*” atas kehadiran Komite III DPD RI yang telah berkunjung ke Yogyakarta untuk memperoleh masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai rancangan Undang-Undang Inisiatif DPD RI. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah

kami akan selalu berusaha dapat membantu Bapak/Ibu sekalian dengan seoptimal mungkin.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Kita menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang semakin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga diharapkan jumlah lanjut usia juga semakin bertambah.

Walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ini pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan dan dikembangkan melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya.

Hadirin yang saya hormati,

Lanjut usia merupakan masa saat kemampuan manusia secara fisik menurun karena telah termakan oleh umur. Menjadi tua memang tidak bisa dihindari oleh siapa pun. Namun yang terpenting dari itu semua, bagaimana menjadi tua yang sehat, kuat

dan mandiri, serta berkualitas. Melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, dapat ditujukan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya, demi memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kami menyambut baik kunjungan Bapak/Ibu sekalian dalam rangka inventarisasi materi terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ini.

Demikian sekelumit yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada pertemuan ini, dan untuk penjelasan lebih lanjut secara mendalam tentang pemikiran, gagasan dan pandangan dari DIY, dapat dibahas pada diskusi selanjutnya dengan SOPD/institusi terkait. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI I DPR RI KE DIY
Yogyakarta, 13 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Pimpinan Komisi I DPR RI; beserta rombongan,**
- **Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Yogyakarta, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan “*selamat datang dan terimakasih*” atas kehadiran Komisi I DPR RI yang telah berkunjung ke Yogyakarta. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta senantiasa kita akan membantu Bapak/Ibu sekalian secara optimal dan maksimal, sehingga diharapkan akan dapat membawa hasil yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Berkaitan dengan materi kunjungan spesifik dalam rangka mengetahui cegah dan deteksi dini kerawanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019 untuk stabilitas keamanan yang kondusif. Maka dapat saya sampaikan bahwa stabilitas ketentraman, keamanan dan ketertiban pada saat menjelang (kampanye), pada waktu pelaksanaan maupun pada akhir pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah DIY, senantiasa terus kita pantau dan kita jaga agar suasananya tetap aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat di dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

Hal ini tentunya telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah juga mempunyai tugas dan kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau memelihara keutuhan NKRI. Dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan situasi yang kondusif dan partisipasi masyarakat dengan prinsip demokrasi, *luber, jurdil dan beradab*. Dengan membangun kewaspadaan untuk mengantisipasi setiap kerawanan sosial, konflik dan terganggunya keamanan dan ketertiban massa sebelum, pada saat, dan sesudah Pemilu. Dalam membantu pengamanan sebelum, pada saat, dan sesudah Pemilu telah dibangun partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan Satuan Linmas di Desa/Kelurahan sebagai pengorganisasian masyarakat dalam bela negara.

Sedangkan pola kegiatannya yaitu secara fungsional, meliputi pengamanan yang dilakukan secara fungsional baik oleh Kepolisian Republik Indonesia, aparat Pemerintah Daerah dan institusi terkait lainnya serta potensi masyarakat yang dibina oleh Pemerintah Daerah sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing. Dan secara terpadu, yaitu pengamanan yang dilakukan secara bersama-sama dan selaras oleh Kepolisian Republik Indonesia, aparat Pemerintah Daerah dan institusi terkait lainnya serta potensi masyarakat yang di bina oleh Pemerintah Daerah, atas pertimbangan pihak terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tingkat kerawanan.

Hadirin sekalian,

Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan untuk mengawali pertemuan ini. Selanjutnya saya menyambut baik kunjungan ini dan untuk penjelasan lebih rinci, mendalam tentang materi kunjungan kerja, maka Bapak/Ibu sekalian dapat membahasnya pada diskusi selanjutnya dengan Institusi terkait. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
TIM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU**

Yogyakarta, 29 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Plt Gubernur Maluku selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Pemerintah Provinsi Maluku; beserta rombongan,**
- **Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat

bertemu dan berdiskusi dalam rangka Kunjungan Kerja Tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku ke DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan "*selamat datang*" dan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian untuk berkunjung ke DIY. Semoga kunjungan kerja ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Hadirin yang saya hormati,

Terkait dengan kunjungan ini terkait orientasi JABFUNG ASN Satpol PP Provinsi Maluku ke DIY, maka dapat saya sampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari unsur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah, mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah agar tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Sebagai dasar pijakan secara yuridis telah jelas yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, khususnya Pasal 255 ayat (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sejak awal berdirinya di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950, Satpol PP telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi konsolidasi dan stabilitas teritorial pada daerah-daerah yang baru diamankan angkatan perang. Saat itu tugas-tugas yang berada di luar bidang kepolisian negara merupakan masalah spesifik yang harus ditangani oleh Polisi Pamong Praja, salah satunya menangani bidang pemerintahan umum, khususnya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban di daerah.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, dalam rangka pengembangan karier serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka telah ditetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

Sementara di DIY sendiri beberapa saat yang lalu telah dilaksanakan uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tahun 2018, yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY. Uji kompetensi diikuti oleh 104 calon pejabat fungsional Polisi Pamong Praja, dengan peserta uji kompetensi Polisi Pamong Praja berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul. Penyelenggaraan uji kompetensi ini merupakan sinergi antara Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai-BKD DIY, dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

Sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi, peserta sebelumnya juga telah mengikuti Pra Uji Kompetensi yang dimaksudkan agar peserta mendapatkan materi pembekalan seputar ketugasan Polisi Pamong Praja, tata cara inpassingnya dan perpindahan jabatan fungsional, serta pengarahan persiapan uji kompetensi. Harapannya setelah peserta dapat lulus uji kompetensi untuk segera dapat segera dilantik secara resmi sebagai pejabat fungsional Polisi Pamong Praja di Daerah. Dan Satpol PP akan semakin eksis, tampil dengan wajah yang berbeda, dengan *figure* yang berbeda dan dapat membuktikan bahwa DIY ini aman secara keseluruhan.

Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini. Selanjutnya mengenai penjelasan lebih dalam secara teknis dan terperinci tentang materi kunjungan ini, maka Bapak/Ibu dapat mem bahas nya pada diskusi selanjutnya dengan OPD terkait. Dengan harapan kunjungan kerja ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta membawa hasil sesuai dengan yang kita harapkan, Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan
PENERIMAAN STUDY BANDING
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI
JAWA TENGAH
TERKAIT
PEMBAHASAN RAPERDA PENCABUTAN PERDA

Yogyakarta, 11 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Ketua Rombongan Study Banding Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah;

Bapak/Ibu, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji serta syukur kehadirat *Allah SWT*, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Selamat datang Bapak/Ibu rombongan Study Banding Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah di Yogyakarta, kota yang tumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan, budaya dan pariwisata terkemuka di Indonesia. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan memilih DIY sebagai lokasi study banding Bapak/Ibu sekalian.

Melalui study banding ini, diharapkan Bapak/Ibu sekalian dapat saling berdiskusi, berbagi pengalaman dan menambah wawasan. Semoga study banding ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu seoptimal mungkin. Lebih dari itu,

kehadiran Bapak/Ibu sekalian dapat semakin merekatkan dan menguatkan jalinan silaturahmi antara Pemda DIY dengan Pemprov Jateng Tengah yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Hadirin dan Saudara sekalian,

DIY memiliki predikat yang melekat pada daerah yaitu sebagai Daerah Tujuan Wisata, Kota Budaya dan Kota Pendidikan, yang senantiasa terus kita upayakan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tentunya memerlukan regulasi untuk mendukungnya salah satunya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Berbagai Perda yang diterbitkan, dilakukan pencabutan jika dipandang sudah tidak sesuai relevansinya, Pemda DIY mengusulkan pencabutan lewat mekanisme daerah. Untuk itu terkait dengan maksud dan tujuan study banding Bapak/Ibu sekalian yakni mengenai Pembahasan Raperda Pencabutan Perda, di tempat ini telah hadir bersama kita perwakilan dari instansi terkait yang akan menjelaskan lebih lanjut. Saya yakin ada banyak hal menarik yang tentunya akan menambah wawasan kita semua dalam memahami tata cara Pencabutan Perda.

Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dalam pertemuan ini semua hal yang menjadi pertanyaan Bapak/Ibu di sesi tanya-jawab nanti, dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan memuaskan. Selamat berdiskusi dan kami berharap kita masih dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang lain.

Sekian, terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

SAMBUTAN

PENUTUPAN JOGJA HEBOH 2019

Yogyakarta, 01 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati,

Alhamdulillah, segala puja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena sejak dibuka hingga menjelang penutupan hari ini, kegiatan Jogja Heboh berlangsung dengan aman, lancar dan mendapat sambutan yang positif dari berbagai elemen masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (KADIN DIY) bekerja sama dengan ASITA dan PHRI Yogyakarta, sebagai inisiasiator penyelenggaraan kegiatan Jogja Heboh yang sudah memasuki tahun kedua ini,

dan merangkum semua kegiatan budaya dan bisnis untuk mendongkrak kembali geliat transaksi bisnis di DIY.

Saya yakin, dengan adanya program Jogja Heboh, jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Yogyakarta pada saat *low season* di bulan Februari ini meningkat dari sebelumnya. Hal itu mengingat program ini dirancang dengan semenarik mungkin terlebih diadakannya secara bersamaan dengan Perayaan Tahun Baru Imlek yang memberikan pengaruh positif demi merangsang aktifitas transaksi perekonomian sektor pariwisata dan bisnis di Yogyakarta.

Tahun 2019 merupakan tahun kebangkitan awal pelaku ekonomi di DIY, menyongsong abad yang baru dengan adanya Bandara New Yogyakarta International Airport. Oleh karena itu, Jogja Heboh merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk menampilkan hasil kreatifitasnya melalui pameran UMKM yang menjadi bagian dari program ini. Dan saya melihat, hal ini tidak disia-siakan oleh masyarakat.

Hadirin Sekalian,

Jogja Heboh yang menggelar berbagai jenis kegiatan diantaranya atraksi olahraga, kuliner, fashion, properti, pameran budaya, pameran UMKM dan lainnya, harapannya program ini dapat meningkatkan sinergi antara atraksi yang disuguhkan dengan transaksi, sekaligus dampak signifikan dengan kedatangan wisatawan dari dalam maupun luar negeri ke Yogyakarta.

Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada KADIN DIY, dimana dengan berbagai upayanya, dengan karya nyatanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di DIY. Bahkan lebih jauh lagi, kegiatan Jogja Heboh mampu menjadi ukuran seberapa konsumsi dan seberapa besar daya beli masyarakat menengah ke bawah. Juga untuk kembali melihat rekam jejak guna memperkaya data, seberapa besar kunjungan wisata ke berbagai destinasi wisata di DIY. Hal ini dapat di jadikan acuan guna merencanakan program wisata di tahun 2020 mendatang.

Disinilah letak evaluasi menjadi sangat penting untuk memotivasi semangat kebersamaan membangun DIY yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat lebih merangsang peran serta partisipasi masyarakat dan para pelaku UMKM untuk memacu percepatan laju pembangunan DIY pada masa yang akan datang.

Hadirin Sekalian yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan berakhirnya kegiatan Jogja Heboh 2019 ini, kita semua dapat menjadikannya momentum yang sangat berarti bagi peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon rido-Nya, dengan mengucapkan ***Al-hamdulillahi rabbil'alam***, pada hari ini, **Jum'at Pahing, 01 Maret 2019, Jogja Heboh**, secara resmi saya nyatakan ditutup.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
(Ketua Majelis Pembimbing Daerah
Gerakan Pramuka DIY)**

**Sambutan
RAPAT KERJA DAERAH
GERAKAN PRAMUKA DIY TAHUN 2019
Babarsari Sleman, 16 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati;

- **Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY;**
- **Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-DIY;**
- **Kakak-kakak Pembina serta Para Peserta Rapat Kerja yang saya banggakan;**

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Para Peserta Rapat Kerja yang saya hormati,

Kita semua memahami bahwa [Kepramukaan](#) adalah proses pendidikan di luar lingkungan [sekolah](#) dan di luar lingkungan [keluarga](#) dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan [Prinsip Dasar Kepramukaan](#) dan [Metode Kepramukaan](#), dengan sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur.

Pada era global seperti sekarang ini, gerakan pramuka sangat baik dalam pembentukan "*human character building*" (pembentukan karakter manusia) melalui berbagai jenis latihan dan keterampilan yang

diselenggarakan. Hal ini terbukti mampu menciptakan insan yang mandiri dan bertanggung jawab dan dalam upaya untuk membangun akhlak anak bangsa yang baik, berbudi pekerti, berpikir positif, tangguh, percaya diri, disiplin, inovatif dan setiakawan.

Dengan menitik beratkan pada pembinaan mental dan disiplin yang tinggi kepada para anggotanya, gerakan pramuka telah terbukti mampu melahirkan generasi-generasi muda atau tunas-tunas bangsa yang tangguh dan bertanggung jawab. Gerakan pramuka harus terus ditumbuhkan dan dikembangkan dikalangan anak dan kaum muda. Agar berwatak dan berkepribadian luhur serta memiliki jiwa bela negara yang andal. Hal ini penting mengingat pendidikan pramuka telah berperan sebagai komplemen dan suplemen terhadap pendidikan formal.

Oleh karena itu, saya menyambut baik diselenggarakannya Rapat Kerja ini, sebagai forum evaluasi kegiatan tahun 2018, informasi kegiatan tahun 2019 serta pemantapan rencana kegiatan tahun 2020 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY.

Saudara-saudara sekalian,

Kita ketahui bersama, bahwa nilai-nilai karakter kebangsaan saat ini semakin luntur dan memudar. Timbulnya kesadaran hak-hak individu warga negara serta berkembangnya demokratisasi yang sangat cepat, dan tanpa disadari kebebasan demokratisasi tersebut cenderung melemahkan ikatan kebangsaan serta kesadaran untuk bela negara.

Untuk itulah, kegiatan Kepramukaan sebagai salah satu wahana yang baik, guna meningkatkan rasa nasionalisme, sikap hormat menghormati dan menciptakan generasi muda yang jujur, tangguh mandiri dan pekerja keras sehingga dapat meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air serta rasa persatuan dan kesatuan yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk itulah, khususnya kepada para peserta Rapat Kerja, saya mengharapkan agar tetap terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan didalam membimbing adik-adik pramuka sebagai generasi calon-calon pemimpin di masa depan dan menjadi generasi muda yang tangguh dan dapat dibanggakan oleh negara dan bangsa.

Selanjutnya dalam rangka tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita, maka pendidikan yang berwawasan kebangsaan yang harus kita tanamkan dan kita tidak boleh lengah dan lupa akan makna hakiki nilai-

nilai kebangsaan tersebut, secara khusus hal ini sangat penting dalam menyikapi dan menghadapi era perubahan dan kemajuan yang terjadi dewasa ini, dan yang akan terus menerus terjadi di masa-masa mendatang.

Wawasan kebangsaan dalam rangka penguatan integrasi bangsa Indonesia, maka yang harus dilakukan, seperti misalnya dengan menanamkan pemahaman dan pengetahuan tentang budaya berbangsa dan bernegara, didalam lingkungan dinamika politik yang terus berkembang seperti saat ini. Hal ini penting, karena merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dengan berbagai tekanan dan desakan perubahan situasi lingkungan global, kita harus mampu menghadapi dan menjaga tetap eksisnya bangsa dan negara, yang merupakan wujud kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan jati diri, dengan karakter budaya yang mencerminkan kehendak bersama, yang merupakan unsur penggerak setiap individu untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Bhineka Tunggal Ika, yang harus kita kembangkan. Kita harus bisa hidup rukun, damai, penuh toleransi dalam kemajemukan, dalam keberbedaan. Karena memang kita dilahirkan menjadi bangsa yang beragam. Dalam perkembangan sejarah, banyak keragaman yang muncul, tetapi kuncinya satu, *we have to be more united*, kita harus lebih bersatu sebagaimana tercermin di dalam masyarakat DIY yang merupakan miniaturnya Indonesia, serta sesuai dengan budayanya yang santun, damai, tenteram, tertib, disiplin dan aman di dalam kerangka NKRI. Serta dengan mengembangkan sikap dan rasa patriotisme, cinta kepada tanah air dan cinta bangsa, yang di samping mempertahankan juga dengan mengisinya.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirohim*" **Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka DIY Tahun 2019**, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Babarsari Sleman, 16 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH
GERAKAN PRAMUKA DIY)

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA REGIONAL III
Yogyakarta, 12 Maret 2019**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata,
Kementerian Pariwisata RI;
Yang saya hormati, Para Narasumber;
Hadirin Tamu Undangan serta Para Peserta Rakor dari 13 Provinsi
Wilayah Timur Indonesia yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi pada Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebelumnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan "Selamat datang dan terimakasih" atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian di Yogyakarta. Semoga Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan rumusan bagi pengembangan destinasi pariwisata di wilayah timur Indonesia.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

DIY mempunyai wilayah yang tidak terlalu luas, hanya 3.185,80 kilometer² atau 0,17% dari luas Indonesia. Dengan luas wilayah yang sangat terbatas ini otomatis sumber daya alam juga sangat terbatas. Namun demikian kita memiliki predikat yang melekat yaitu sebagai *Daerah Tujuan*

Wisata, Kota Budaya dan Kota Pendidikan, yang senantiasa kita upayakan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan pertemuan ini mengenai pengembangan destinasi pariwisata, maka dapat saya sampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama pembangunan DIY. Pariwisata memberikan andil besar dalam memacu pertumbuhan perekonomian DIY. Kegiatan sektor pariwisata juga memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan pertanian dan industri. Selain itu sektor pariwisata memberikan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha sekaligus membantu dalam program pengentasan kemiskinan.

Adapun visi kepariwisataan sampai tahun 2025, yaitu *akan mewujudkan DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara*. Pemda DIY dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut melaksanakan program/kegiatan pembangunan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan DIY didukung dengan 4 (empat) program utama yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan dan Program Pengembangan Desa.

Jumlah wisatawan yang datang ke DIY dari tahun ketahun juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini karena adanya faktor pendukung pertumbuhan jumlah wisatawan diantaranya adalah DIY dipandang sebagai daerah yang relatif aman dan nyaman, memiliki beraneka ragam daya tarik wisata yang dikelola dengan baik. Sebagai pusat budaya, DIY memiliki ragam daya tarik budaya mencakup dari masa Mataram Hindu hingga Mataram Islam diantaranya keberadaan peninggalan candi dan kawasan Kraton Yogyakarta.

Sedangkan aktivitas pariwisata menjadi penggerak kegiatan sektor perekonomian lainnya mulai dari penyediaan jasa akomodasi, jasa angkutan hingga penyediaan produk-produk industri pendukung pariwisata. Secara langsung, aktivitas pariwisata memberikan manfaat dalam penyerapan lapangan kerja di sektor perhotelan. Dan tentu saja penciptaan lapangan kerja tidak hanya dari perhotelan saja melainkan usaha pendukung lainnya.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dalam pengembangan kepariwisataan, Pemerintah DIY juga telah menyusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sehingga akan dapat lebih terpadu dan terarah, karena dokumen ini juga akan menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RIPPARDA Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah DIY juga senantiasa menjalin jaringan kerja bersama-sama dengan seluruh pelaku dan masyarakat pariwisata untuk mengupayakan dan meningkatkan sektor pariwisata, dengan harapan pariwisata dapat mampu menjadikan andalan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin sekalian,

Konsep kepariwisataan kita adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan konsep tersebut, maka yang dipakai sebagai landasan adalah: Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (*Sustainable tourism development*) dan pariwisata yang berbasis masyarakat (*Community based tourism*).

Disamping itu, pembangunan kepariwisataan juga merujuk pada norma-norma religi dan nilai-nilai budaya yang berakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebuah konsep tentang hidup bangsa Indonesia yang lestari, hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan seperti alam, budaya dan geografis, sehingga tercipta konsep hubungan yang berkeselamatan (*balance of life*). Sebuah konsep yang mengajarkan manusia agar tidak rakus dan selalu mampu mengendalikan diri dalam mengeksploitir sumberdaya alam dan upaya pelestariannya.

Ada tiga aspek yang sangat mendukung dalam kesuksesan pariwisata, yakni aspek produk (*destinasi*), pelayanan, dan pengelolaan, sehingga, tantangan masa depan pariwisata adalah konsistensi dalam menjaga citra pariwisata. Citra baik itu berasal dari kenyamanan, keamanan, akses, keragaman aktivitas, hingga harga yang ditawarkan kepada wisatawan.

DIY memiliki banyak ragam budaya yang sampai sekarang masih hidup, dan berkembang di tengah masyarakat. Penerapan kegiatan pariwisata berbasis budaya di [DIY](#), khususnya Yogyakarta sejak tahun 2008, telah mencanangkan diri sebagai kota pariwisata berbasis budaya. Kekayaan budaya tersebut bahkan menjadi objek wisata yang menarik bagi wisatawan,

misalnya tempat bersejarah, adat istiadat, masakan khas, dan kesenian tradisional. Pengembangan pariwisata disesuaikan dengan potensi yang ada dan berpusat pada budaya [Jawa](#) yang selaras dengan sejarah dan budaya [Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat](#), kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Hadirin sekalian,

Banyak rencana aksi telah dicanangkan untuk mendukung pelaksanaan program ini. Mulai dari pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas [fasilitas](#), memperbanyak *event-event* wisata, seni, dan budaya, sampai ke optimalisasi [pemasaran](#) program. Dengan menggali potensi seni-budaya setempat sebagai basis pengembangan pariwisata di daerah ini, maka predikat DIY sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata diharapkan akan tetap melekat, dan semakin kokoh

Untuk menarik wisatawan berkunjung ke DIY, Pemda DIY terus mengupayakan pengembangan ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) baru di seluruh Kabupaten/Kota. Perkembangan jumlah daya tarik obyek wisata baru tersebut didukung dengan peningkatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pertumbuhan Pokdarwis tersebut menjadi indikasi semakin besarnya peran masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata. Di DIY ada Desa/Kampung wisata yang menjadi salah satu strategi pengembangan wisata berbasis *ecotourisme*. Selain itu, melalui pengembangan desa wisata, diharapkan masyarakat pedesaan bisa turut mendapatkan manfaat dari aktivitas pariwisata.

Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
SARDJITO FAIR
“SARDJITO SEMAKIN DEKAT DENGAN RAKYAT”
Yogyakarta, 17 Maret 2019**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, Dr.dr. Darwito, S.H.,Sp.B (K) Onk;**
- **Para Dokter, Perawat, Pengelola serta Segenap Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa layanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan standart dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka mutu pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit harus terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan diharapkan senantiasa dapat mengembangkan diri dalam menjawab kebutuhan masyarakat dengan jaminan mutu terhadap pelayanannya dan tuntutan untuk memberikan pelayanan secara prima.

Untuk itulah atas nama Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja RSUP Dr. Sardjito selama ini, didalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat luas yang telah dilaksanakan secara baik, optimal dan maksimal. Sekaligus ucapan selamat atas Hari Ulang Tahun yang ke-37, semoga dapat terus maju dan berkembang di dalam meningkatkan standar mutu kualitas pelayanannya.

Selain itu, kegiatan Sardjito Fair dengan tema “Sardjito Semakin Dekat Dengan Rakyat” pada hari ini, diharapkan akan semakin mendekatkan lagi RS. Sardjito dengan masyarakat luas. Mereka akan secara langsung dapat memeriksakan kesehatannya di acara ini sekaligus akan mengerti arti pentingnya gaya hidup sehat melalui program edukasi kesehatan. Dan kedepan pelaksanaan kegiatan seperti ini diharapkan dapat terselenggara secara rutin pada setiap tahunnya.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
SELAMAT DATANG PADA
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA MENUJU DESA MAJU DAN MANDIRI SE-
WILAYAH KERJA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI
YOGYAKARTA
TAHUN 2019
Jogja Expo Center Yogyakarta, 26 Maret 2019**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri RI;**
- **Yang saya hormati, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi RI;**
- **Yang saya hormati, Pejabat Lembaga Negara;**
- **Yang saya hormati, Para Narasumber;**
- **Hadirin Tamu Undangan serta Para Aparatur Pemerintah Desa se-Wilayah Kerja Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah beserta seluruh masyarakat DIY, saya menyampaikan ucapan “Selamat Datang” kepada Bapak Tjahjo Kumolo Menteri dalam Negeri RI, Bapak Eko Putro Sandjojo Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi RI serta kepada Seluruh Narasumber yang telah berkenan menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menuju Desa Maju Dan Mandiri Se-Wilayah Kerja Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta Tahun 2019.

Bapak Menteri dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam UU ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa. Salah satunya adalah sumber pendanaan baru bagi desa dari APBN. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa, sejak tahun 2015 dan selalu meningkat, namun juga tetap memperhatikan kemampuan negara dan kapasitas pelaksanaan desa.

Di DIY telah disalurkan dana desa hingga 2018 sebesar 1,138 triliun dan tahun 2019 sebesar 423,785 milyar untuk 392 desa. Kami sampaikan juga, penyaluran dana desa 2019 Tahap I sudah dilaksanakan dari RKUN ke seluruh RKUN Kabupaten di DIY. Secara umum pengelolaan dana desa di DIY dapat berjalan dengan baik meskipun juga ada beberapa kendala dan hambatan pada pelaksanaannya.

Kami senantiasa mengapresiasi Pemerintah Pusat yang senantiasa memperbaiki/menyempurnakan kebijakan untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana desa melalui strategi reformulasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan, skema padat karya tunai, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha desa serta pelaksanaan berbasis kinerja. Kami juga berharap senantiasa terjadi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, baik di jenjang Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa serta pemangku kepentingan terkait.

Bapak/Ibu dan Hadirin yang saya hormati,

Dengan forum ini diharapkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dapat sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Serta dapat mewujudkan pertanggungjawaban dana desa secara transparan dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, berwibawa dan akuntabel dalam rangka *good governance*.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita semua.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Jogja Expo Center Yogyakarta, 26 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
SEMINAR NASIONAL
70th SERANGAN UMUM 1 MARET 1949, PENEGAKKAN
KEDAULATAN NEGARA
Museum Benteng Vredeburg, 2 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa, Mayjen TNI (Purn) Lukman R. Boer;**
- **Yang saya hormati, Para Narasumber;**
- **Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara Seminar Nasional 70th Serangan Umum 1 Maret 1949, Penegakkan Kedaulatan Negara, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa salah satu penggalan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di dalam menghadapi agresi militer belanda ke 2 adalah adanya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Aksi serangan yang dilancarkan oleh TNI dan rakyat ini berawal dari keinginan menepis anggapan dunia internasional yang menyatakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi.

Dengan serangan umum dibawah komando Panglima Besar Sudirman, ingin membuktikan bahwa [Tentara Nasional Indonesia](#) (TNI) masih ada dan cukup kuat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral [pasukan Belanda](#) serta membuktikan pada dunia [internasional](#) bahwa TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan waktu itu.

Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 ini karena terjalinnya kekompakan antara tentara angkatan bersenjata dan rakyat yang mempunyai semangat pantang menyerah, ulet, gigih, rela berkorban serta percaya kepada diri sendiri dan peristiwa tersebut merupakan wujud nyata adanya persatuan dan kesatuan, maka semangat dan jiwa dari nilai-nilai keteladanan tersebut patut untuk kita warisi dan diteladani hingga kini dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini.

Sehingga makna sejarah Serangan Umum 1 Maret ini tidak hanya merupakan milik warga Yogyakarta, tetapi juga untuk Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai kepahlawanan dari para pejuang akan sangat penting dalam rangka pembentukan karakter bangsa saat ini. Dengan simbol perjuangan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 di kawasan Titik Nol kilometer Yogyakarta ini.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Sehubungan dengan hal tersebut maka atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) bekerjasama dengan Panitia Peringatan 70 tahun Serangan Umum 1 Maret 1949 DIY serta pihak terkait lainnya yang telah menyelenggarakan Seminar Nasional 70th Serangan Umum 1 Maret 1949, Penegakan Kedaulatan Negara. Forum ini diharapkan dapat membangun patriotisme dan nasionalisme generasi muda, menumbuhkan semangat kejuangan, kepahlawanan, persatuan dan kesatuan untuk kemandirian bangsa.

Semangat kepahlawanan dari para pejuang inilah yang harus tetap diwarisi oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih pada generasi muda bangsa saat sekarang, untuk bersama-sama mengisi alam kemerdekaan ini dengan lebih baik dan maju menuju kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa Indonesia.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, **Seminar Nasional 70th Serangan Umum 1 Maret 1949, Penegakkan Kedaulatan Negara**, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Museum Benteng Vredeburg, 2 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
SEREMONI *SWITCH OFF*
EARTH HOUR JOGJA 2019
Yogyakarta, 30 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Yang saya hormati, Koordinator *Eart Hour* Yogyakarta;**
- **Yang saya hormati, Para Aktifis Komunitas; serta unsur Media massa,**
- **Hadirin Tamu Undangan dan Warga Masyarakat Yogyakarta yang saya cintai;**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Masyarakat Yogyakarta yang saya cintai, hari ini, bersama-sama dengan masyarakat di seluruh dunia, di Daerah Istimewa Yogyakarta akan turut berpartisipasi untuk memadamkan lampu sebagai salah satu aksi untuk melawan perubahan iklim. Partisipasi tersebut ditandai dengan pemadaman lampu beberapa situs di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Tugu Jogja, Candi Prambanan, Benteng

Vredeburg, Gedung BNI 46, Kantor Pos, Gedung BI, dan sebagainya.

Selain itu banyak komunitas, hotel, dan usaha-usaha lain di Yogyakarta yang juga ikut berpartisipasi dalam acara *Switch Off* tahun 2019 ini. Pada tahun 2019 ini, *Earth Hour* Jogja mengadakan acara *Switch Off Earth Hour* Jogja 2019 dengan mengusung tema *Green Tourism: Gotong Royong, Ngerumat Bumi*. Melalui tema ini, *Earth Hour* Jogja sesungguhnya mengajak kita, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya, untuk memajukan pariwisata yang ramah lingkungan.

Hadirin sekalian,

Dengan momentum ini, kita dapat memajukan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya, sekaligus menjaga bumi kita agar tetap lestari dan nyaman untuk ditinggali. Namun, sebenarnya seberapa pentingkah aksi kita hari ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka marilah kita melihat dan mendengar berita, artikel, hingga video yang mendiskusikan masalah lingkungan seperti kebakaran hutan, kepunahan, pencemaran ekosistem, hingga perubahan iklim.

Perubahan iklim sendiri adalah masalah global yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Kita juga tidak bisa merasakan perubahan tersebut secara langsung ataupun signifikan. Namun, bukan berarti masalah tersebut tidak nyata. Perubahan-perubahan tersebut benar-benar terjadi. Misal seperti suhu bumi mengalami kenaikan, tingkat keasaman air laut meningkat, permukaan air laut naik hingga 8 inchi, dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut terus meningkat dan terjadi semakin cepat setiap tahunnya. Apalagi dengan pertumbuhan wisata dan kebutuhan masyarakat lainnya. Semakin banyak hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan usaha atau aktifitas kita, yang menggunakan listrik begitu besar, menghasilkan sampah, dan sebagainya.

Meskipun saat ini kita hidup dengan nyaman, marilah kita juga mencegah, agar kondisi bumi kita tidak semakin parah. Untuk itu, atas nama pimpinan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Jajaran, saya mendukung aksi *Switch Off Earth Hour Jogja* dan mengajak masyarakat Yogyakarta, untuk berpartisipasi melawan perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya.

Warga Yogyakarta yang berbahagia,

Mari kita bergotong-royong bersama dengan orang-orang di Indonesia, dan di dunia, untuk menjaga, melestarikan bumi ini. Kita tumbuhkan kesadaran untuk mempunyai gaya hidup yang ramah lingkungan. Kita bisa mulai dengan mematikan listrik yang tidak terpakai, menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali. Pemadaman listrik selama satu jam ini dapat menghemat listrik secara signifikan apabila kita mampu bersinergi. Di tahun 2016 yang lalu, kegiatan *Switch Off Earth Hour Jogja* ini berhasil menghemat listrik sebesar 3,53% di DIY. Di tahun 2017, total penghematan listrik sebesar 7,58%. Tahun lalu, aksi ini menghemat sebesar 7,28% listrik. Oleh sebab itu, marilah kita galakan kembali, aksi-aksi kecil yang ramah lingkungan. Kita terapkan gaya hidup, gaya berbisnis, yang pro terhadap lingkungan dan melawan perubahan iklim.

Jangan sampai kita berhenti berusaha menjaga bumi kita. Karena sebenarnya semuanya sederhana, kita belum terlambat untuk melawan. Mari Masyarakat Yogyakarta, pemadaman lampu selama satu jam ini menjadi penanda partisipasi kita dalam melakukan upaya Gotong Royong melestarikan Bumi secara berkelanjutan. Ini Aksiku. *Connect to Earth*.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
TAWUR AGUNG KESANGA MENYAMBUT PERAYAAN HARI
RAYA NYEPI TAHUN BARU SAKA 1941 (2019 M)
Candi Prambanan, 6 Maret 2019**

*Om Swastiyastu
Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Yang saya hormati:

- Jajaran Forkompimda DIY;
- Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DIY;
- Para Pejabat di lingkungan Pemda DIY;
- Para Pimpinan Umat Lintas Iman DIY;

Hadirin dan Segenap Umat Hindu yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini untuk menghadiri Perayaan Tawur Agung tingkat Nasional pada Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941. Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan “Selamat Hari Raya Nyepi”, disertai salam bahagia kepada seluruh umat Hindu. Semoga di Tahun Baru Saka 1941, umat Hindu senantiasa diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Upacara Tawur Agung Kesanga Nasional ini penting dilaksanakan mengingat kata tawur berarti “mengembalikan” atau “membayar”. Manusia selalu mengambil sumber-sumber alam untuk mempertahankan hidupnya.

Perilaku mengambil perlu diimbangi dengan perbuatan memberi, yang berupa persembahan yang ikhlas dan bermakna memotivasi keseimbangan jiwa yaitu melepaskan sifat-sifat serakah yang melekat pada diri manusia. Demikian juga, perayaan Nyepi dilaksanakan dengan penuh keheningan dengan menghentikan segala aktifitas, baik yang bersifat duniawi maupun dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Berusaha mengendalikan diri agar dapat tenang dan damai lahir batin dengan menjalankan Catur Brata Penyepian.

Kegiatan ini merupakan suatu ajaran untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama dengan cara saling maaf-memaafkan dengan ucapan yang suci dan tulus. Oleh karena itu sudah semestinya setelah melakukan Nyepi umat Hindu harus dengan jernih hati menghapus semua kekhilafan. Dengan demikian kerukunan di tengah-tengah kita akan semakin terjalin yakni kerukunan internal umat Hindu serta kerukunan antara umat Hindu dengan umat beragama lainnya.

Kita tentunya berharap juga agar kegiatan ini tidak sekedar seremoni, melainkan harus membekas di hati sanubari kita. Apabila dalam kehidupan sehari-hari, ibadah kita kepada Tuhan dan hubungan kemasyarakatan senantiasa terjaga dengan baik, maka berbagai permasalahan akan dapat kita selesaikan dengan baik pula.

Hadirin dan Saudara sekalian yang berbahagia,

Sebagai bagian penting dari kegiatan keagamaan di kalangan umat Hindu dan sebagai ajang yang sarat dengan nilai spiritual dimana kita akan selalu mendekati diri dengan Tuhan Yang Maha Esa serta mengamalkan nilai-nilai dharma dan estetika, meningkatkan keimanan serta rasa kemanusiaan demi terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang harmonis. Maka sangat diharapkan kita senantiasa melakukan berbagai tindakan dan niatan positif yang baik sejalan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah ajaran agama Hindu.

Kita harus mampu mengemban tugas dan kewajiban kita sebagai umat yang baik, maka tidak akan terjadi kesalahan langkah dan kesalahan tindakan kita yang mungkin merugikan umat dan diri kita sendiri. Karena perilaku yang kurang memperhatikan hal-hal tersebut akan memunculkan berbagai persoalan besar yang menghimpit dan mengganggu jalannya tatanan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang di masyarakat.

Kegiatan keagamaan ini akan bermakna kalau kita juga dapat memetik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau kita bisa menghayati setiap peristiwa religius, di situ akan dapat dipetik mutiara-mutiara kehidupan yang akan menjadi inspirasi dan sumber motivasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Semakin kita menghayati dan meresapi mutiara-mutiara kehidupan yang terkandung dalam setiap peristiwa religius, niscaya semakin meningkat pula wawasan kita dalam mengarungi hidup, kehidupan dan penghidupan ini, baik sebagai perseorangan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Untuk itu, menjadi kewajiban kita untuk memberi mereka penerangan, membantu mereka agar menjadi bersih dan kuat batinnya. Pengetahuan batin yang diberikan diharapkan dapat menghapuskan penderitaan-penderitaan yang timbul dalam pikirannya. Ia yang bisa memberi pengetahuan batin kepada orang lain, sebenarnya orang yang paling bijaksana dari bangsa-bangsa di dunia ini, karena ilmu pengetahuan batin/rohaniah adalah basis dari segala kehidupan manusia. Seorang yang sehat dan kuat batinnya akan kuat pula dalam segi-segi aktifitas lainnya. Apabila orang itu kuat benar batinnya, maka segala kebutuhan badan jasmanipun akan tidak dapat mempengaruhi lagi.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, atas perhatiannya.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Om Santi Santi Santi Om,

Candi Prambanan, 6 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
UPACARA
PERINGATAN SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 KE-70
DI TAHUN 2019
Yogyakarta, 1 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- **Para Peserta Upacara;**
- **Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,**

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam Upacara Peringatan Serangan Umum 1 Maret 1949 ke-70 di Tahun 2019, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saudara-saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa salah satu peninggalan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di dalam menghadapi agresi militer belanda ke 2 adalah adanya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Aksi serangan yang dilancarkan oleh TNI dan rakyat ini berawal dari keinginan menepis anggapan dunia internasional yang menyatakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi.

Dengan serangan umum dibawah komando Panglima Besar Sudirman, ingin membuktikan bahwa [Tentara Nasional Indonesia](#) (TNI) masih ada dan cukup kuat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral [pasukan Belanda](#) serta membuktikan pada dunia [internasional](#) bahwa TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan waktu itu.

Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 ini karena terjalannya kekompakan antara tentara angkatan bersenjata dan rakyat yang mempunyai semangat pantang menyerah, ulet, gigih, rela berkorban serta percaya kepada diri sendiri dan peristiwa tersebut merupakan wujud nyata adanya persatuan dan kesatuan, maka semangat dan jiwa dari nilai-nilai keteladanan tersebut patut untuk kita warisi dan diteladani hingga kini dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini.

Saudara-saudara,

Sejarah menunjukkan bahwa Yogyakarta merupakan tempat lahir dan terjadinya peristiwa-peristiwa besar yang berpengaruh bagi perjuangan bangsa Indonesia. Gerakan kebangkitan bangsa dideklarasikan di Yogyakarta. Pendidikan nasional berakar pada pusat pendidikan di Yogyakarta. Demikian juga dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga mendapatkan momentumnya di Yogyakarta yang dibuktikan dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret ini.

Dengan mewujudkan sentuhan edukatif dan kreatif dari Yogyakarta, maka upaya pemupukan daya nalar rakyat Indonesia

dalam mewacanakan kehidupan berbangsa yang berdaulat ketika itu, telah mampu memobilisasi rakyat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan hidup sebagai bangsa yang berdaulat. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah untuk melahirkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, dan hal ini telah terbukti pada kulminasi perjuangan pergerakan nasional yang menghasilkan proklamasi 17 Agustus 1945 serta dalam upaya mempertahankannya.

Selain itu, semangat kepahlawanan dari para pejuang inilah yang harus tetap diwarisi oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih pada generasi muda bangsa saat sekarang, untuk bersama-sama mengisi alam kemerdekaan ini dengan lebih baik dan maju menuju kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa Indonesia.

Pemahaman dan pengetahuan tentang budaya berbangsa dan bernegara ditengah-tengah dinamika politik yang terus berkembang juga sangat penting, karena hal ini merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dengan berbagai tekanan dan desakan perubahan situasi lingkungan global, kita harus mampu menghadapi dan menjaga tetap eksisnya bangsa dan negara, yang merupakan wujud kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan jati diri, yakni karakter budaya yang mencerminkan kehendak bersama, yang merupakan unsur penggerak setiap individu untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan negara.

Munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial, adanya hambatan serta gangguan terhadap keutuhan NKRI harus kita waspadai bersama. Disamping itu adanya kemajemukan yang rentan konflik, gejolak politik daerah, nasional, maupun internasional dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa yang dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Maka kita harus tetap

mewujudkan ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dalam bentuk apapun, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Semangat nasionalisme dan patriotisme serta kewarganegaraan yang harus kita kembangkan dan tingkatkan. Nilai nasionalisme, dapat digambarkan sebagai suatu semangat atau rasa memiliki sebuah bangsa atau adanya kesediaan untuk berkorban demi tegaknya bangsa. Nilai Patriotisme, dapat diartikan sebagai suatu semangat atau rasa rela hati menyerahkan semua untuk mempertahankan kemerdekaan. Nilai Kewarganegaraan, yakni memandang bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagai seorang warga negara.

Oleh karena itulah, dalam rangka tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita, tentunya sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, kita tidak boleh lengah dan lupa akan makna hakiki nilai-nilai kebangsaan tersebut, secara khusus hal ini sangat penting dalam menyikapi dan menghadapi era perubahan dan kemajuan yang terjadi dewasa ini, dan yang akan terus menerus terjadi di masa-masa mendatang.

Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan selalu meridhoi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Sambutan
WOKSHOP PENDIDIKAN PENINGKATAN KESADARAN
BELA NEGARA PEKERJA MEDIA TINGKAT NASIONAL
“MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN
DISIPLIN NASIONAL”
Yogyakarta, 27 Maret 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati, Para Narasumber;
Hadirin Tamu Undangan dan Para Peserta Workshop yang
berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita menyadari bahwa kesadaran bela negara bukanlah bawaan sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan baik di

lingkungan pendidikan, pekerjaan atau pemukiman, dan juga di semua lapisan masyarakat. Maka untuk membangun dan mempertahankan semangat nasionalisme dalam kerangka kesadaran bela negara bagi setiap warga negara tidaklah dengan mudah dijalankan, terlebih lagi dengan adanya keberagaman etnis, keturunan, budaya, agama, adat istiadat, suku dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kita semua harus menyadari bahwa Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia, dengan adanya kemajemukan tersebut. Sehingga semua ini harus kita syukuri karena dengan keragaman ini justru merupakan kekuatan dan aset bagi bangsa kita. Dengan keanekaragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia ini, maka negara telah menjamin hak-hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah ditegaskan di dalam Undang-undang dan konstitusi kita yang telah mengatur tentang multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia.

Dengan dasar multikulturalisme ini maka prinsip “*Bhineka Tunggal Ika*” seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya, suku, agama dan lain-lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 akan dapat tercapai.

Saudara-saudara sekalian,

Bela Negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Konsep bela Negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh,

secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Terkait dengan hal tersebut dan sesuai dengan tema kali ini yaitu membangun SDM dengan Disiplin Nasional. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari kata '*disiplin*' sering dihubungkan dengan tindakan atau perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap keteraturan, misalnya bekerja tepat waktu, bekerja sesuai dengan prosedur, dan bekerja dengan semangat dan konsistensi tinggi. Sosok perilaku disiplin '*ideal*' yang sering disebut adalah disiplin militer yang sangat menjunjung tinggi prosedur pelaksanaan tugas yang dikombinasi dengan hukuman yang berat jika terjadi pelanggaran. Terlepas dari berbagai konotasi yang terkandung di dalamnya, serta spekulasi etimologis yang menyertainya, kata *disiplin* sangat erat berkaitan dengan ketaatan pada aturan yang telah ditetapkan, baik keteraturan waktu maupun prosedur. Disiplin merupakan perasaan [taat](#) dan patuh terhadap [nilai-nilai](#) yang dipercaya termasuk melakukan [pekerjaan](#) tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

Kedisiplinan memerlukan latihan, dan pembelajaran pada seseorang yang belum mengenal perilaku yang harus dilakukannya. Meskipun demikian secara umum kedisiplinan sebagai suatu norma yang berlaku secara umum, akan berkaitan erat dengan mental dan perilaku kehidupan sehari-hari. Dengan demikian bila memang disiplin memerlukan latihan dan pembelajaran, maka hal itu dapat dilakukan kepada setiap orang sejak berada dibangku sekolah.

Secara umum bangsa yang mencapai tingkat kemajuan yang pesat memiliki masyarakat yang disiplin dalam pola kehidupan kesehariannya, karena dengan tingkah laku disiplin

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk dalam berproduksi. Dengan demikian maka kebiasaan yang kita lakukan menentukan masa depan kita, kebiasaan yang baik dapat menghasilkan sesuatu yang baik, begitu pula sebaliknya, namun untuk membiasakan kebiasaan menjadi suatu sikap adalah sesuatu yang tidak mudah.

Untuk itulah, maka saya menyambut baik kegiatan Wokshop Pendidikan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Pekerja Media Tingkat Nasional dengan tema “Membangun SDM dengan Disiplin Nasional”. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat bela nenaga, wawasan kebangsaan serta semangat persatuan dan kesatuan melalui disiplin nasional kepada para peserta worshop sekalian.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



**Governor
Of Yogyakarta Special Region**

**Welcome Speech
THE 6th OSHNET CONFERENCE**

Yogyakarta, March 28th 2019

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.
May peace be upon us all.

Excellencies:

- **Mr. M. Hanif Dhakiri, Minister of Manpower of the Republic of Indonesia;**
- ILO Director for Indonesia and Timor Leste;
- ASEAN Deputy Secretary General;
- The Participants of The 6th OSHNET Conference;
- Distinguish Guest.

First of all, let us praise God the Almighty who has bestowed His blessings upon us and the joy of all of us can still gather in the opening of The 6th OSHNET Conference without any barriers at all and in good health.

Furthermore, on behalf of the Yogyakarta Special Region Government, I am delighted to say "Welcome" in Yogyakarta to the Minister and all delegates of conference participants. It is an honor and happiness for us to be able to attend and meet you and our pride, Yogyakarta is believed to be the host of an international conference.

Ladies and Gentlemen,

Occupational safety and health in many companies in the world are still seen as one eye. Many companies consider the issue of occupational safety and health as a minor problem, so they do not need to focus on implementing occupational safety and health management specifically.

Human resources play a very important role in the production process. Of all production factors such as human power, raw materials, auxiliary materials, money, machinery, methods, etc., humans are the most important factor, not only because humans can influence the amount of product quality produced, but because humans also determine the use of factors other factors.

Good implementation of occupational safety and health regulations is not only the responsibility of the government, but also the responsibility of all elements involved, such as the company or entrepreneurs, workers, and the community as a whole.

Based on this, the Yogyakarta Special Region Government strongly supports the existence of The 6th OSHNET Conference as one of the socialization efforts regarding the importance of occupational safety and health. The implementation of a culture of occupational safety and health will create a healthy, comfortable and conducive work environment so that workers can make optimal contributions to their excellent health conditions.

That is what I can convey as an speech to this conference opening. May God the Almighty always bestow his blessings upon us all. Amen.

Thank you.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Yogyakarta, March 28th 2019

GOVERNOR OF
YOGYAKARTA SPECIAL REGION

HAMENGKU BUWONO X